



Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah



LKJIP TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



(024) 3511351



dinkesjatengprov.go.id



Jl. Piretendan No. 24, Sekayu



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
1.3 Isu-isu Strategis	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	9
1.5 Sistematika Penulisan	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022	15
1.7 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2022	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2022	24
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2 Realisasi Anggaran dan Pendapatan	81
3.3 Inovasi	97
3.4 Penghargaan	98
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Rekomendasi	102
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinkes Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan di lingkungan Dinkes Provinsi Jateng Tahun 2023	11
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinkes Provinsi Jateng tahun 2023	11
Tabel 1.3 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinkes th 2023	12
Tabel 1.4 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	15
Tabel 1.5 Tindaklanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2022	16
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2019-2023	20
Tabel 2.2 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	23
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinkes Jateng tahun 2022	25
Tabel 2.5 Struktur Program, Kegiatan dan Indikator Dinkes tahun 2023	27
Tabel 3.1 Capaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2023	37
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinkes Tahun 2023	42
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dengan Capaian Kinerja 2019-2023	54
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Target Akhir RPJMD Tahun 2023	59
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional Th 2023	60
Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Tahun 2023	64
Tabel 3.7 Analisis terhadap Efisiensi Sumber Daya terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2023	69
Tabel 3.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran	74
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2023	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan	3
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Tahun 2023	5
Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPT Dinas Kesehatan Th 2023	5
Gambar 2.1 Aplikasi GRMS	35
Gambar 2.2 Aplikasi PAIJO GR	36
Gambar 3.1 Jumlah Kasus Kematian Ibu per Kab/kota Tahun 2023	39
Gambar 3.2 Jumlah Kasus Kematian bayi per kab/kota tahun 2023	40
Gambar 3.3 Jumlah Kasus Kematian Balita per Kab/Kota Tahun 2023	40
Gambar 3.4 Indeks Keluarga Sehat per Kab/Kota Tahun 2023	41
Gambar 3.5 Tren Angka Harapan Hidup Prov. Jateng Tahun 2018-2023	44
Gambar 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi AHH Tahun 2019-2023	45
Gambar 3.7 Tren Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023	45
Gambar 3.8 Tren Target dan Realisasi AKI Tahun 2019-2023	46
Gambar 3.9 Tren Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2019-2023	47
Gambar 3.10 Tren Target dan Realisasi AKB Tahun 2019-2022	47
Gambar 3.11 Tren Jumlah Kasus Kematian Balita Tahun 2019-2023	48
Gambar 3.12 Tren Target dan Realisasi AKABA Tahun 2019-2023	49
Gambar 3.13 Tren Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2019-2023	49
Gambar 3.14 Tren Proporsi Kasus Penyakit Menular Tahun 2019-2023	50
Gambar 3.15 Tren Persentase Ketercapaian PTM dan Keswa 2019-2023	51
Gambar 3.16 Tren Target dan Realiasi IKS Tahun 2019-2023	53
Gambar 3.17 Inovasi PAIJO GR	97
Gambar 3.18 Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Tahun 2023	99

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Kesehatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor 050/234/1.1/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Semarang, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH


YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.SC, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700531 199311 2001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tercantum bahwa kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Peraturan Gubernur nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Balai. Terdapat 8 Balai yang menjadi UPT Dinas Kesehatan yaitu: 5 (lima) Balai Kesehatan Masyarakat, 1 (satu) Balai Kesehatan Indra Masyarakat Kelas A, 1 (satu) Balai laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A dan 1 (satu) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A. Setiap balai mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. Balai Kesehatan Masyarakat, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2. Balai Kesehatan Indra Masyarakat, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Kesehatan Indera Masyarakat. mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

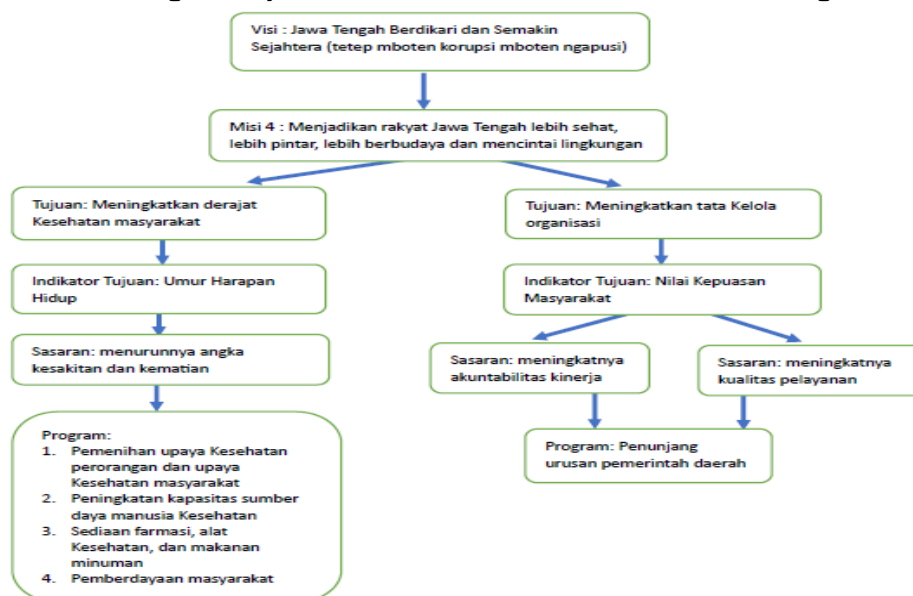
3. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan
4. Balai Pelatihan Kesehatan, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Pelatihan Tenaga Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelatihan dan Penunjang Pelatihan

Agar berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

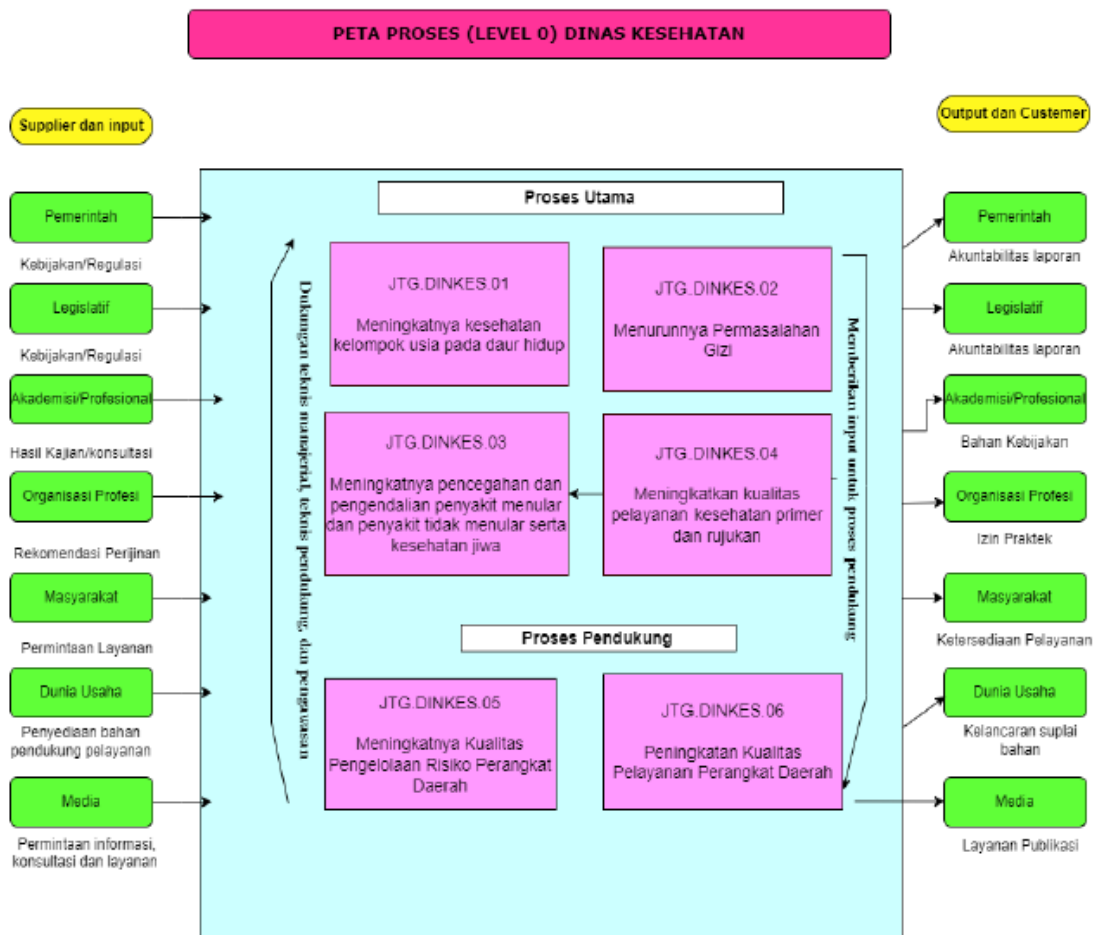
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah



Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan pemerintah daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023.

Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah



Dalam rangka melaksanakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, telah disusun Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 072.4/22934/2023 tanggal 12 Desember 2023.

1.3 Isu – isu Strategis

Dinas Kesehatan mendukung pencapaian misi ke-4 Jawa Tengah yaitu Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan. Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian. Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah:

1. Tingginya angka kesakitan dan kematian

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI 2023:88,11/100.000 KH; AKB 2023: 9,28/1.000 KH; AKABA 2023:10,74/1.000 KH) meskipun angka ini sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI:226/100.000 KH; AKB:24/1.000 KH). Masih adanya AKI di Jawa Tengah disebabkan banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Penyebab kematian ibu karena hipertensi cenderung meningkat dalam 3 tahun ini. Penyebab terbanyak secara berturut-turut adalah karena hipertensi, perdarahan, infeksi dan jantung.

Tingginya AKB yang antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, *pneumonia*, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Komitmen yang dirasakan masih kurang dari pemangku kebijakan, pemberi pelayanan, masyarakat dan individu menjadi point penting masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Angka kesakitan dan kematian penyakit menular masih tinggi, sedangkan penemuan kasus belum optimal. Jumlah kasus baru penyakit bersumber binatang (tular vektor dan *zoonotik*) masih perlu dikendalikan. Belum semua desa mencapai UCI (*Universal Child Immunization*), karena masih ada penolakan di sebagian wilayah Kabupaten di Jawa Tengah. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di Jawa Tengah. Jumlah penderita dan

luas penyebarannya semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Adanya pandemi Covid-19 yang terus meningkat kasus dan kematiannya menjadi masalah baru kesehatan. Perlu adanya perubahan perilaku dengan adanya adaptasi kebiasaan baru menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas.

Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes mellitus* (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) dan gangguan kesehatan jiwa cenderung meningkat. Deteksi dini faktor risiko PTM, keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyakit tidak menular juga belum optimal sehingga diperlukan dukungan regulasi dari *stake holder*/pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Angka stunting di Jawa Tengah tahun 2023: 10.65 berdasarkan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM). Masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas saat ini adalah malnutrisi kronis pada balita, yang direpresentasikan oleh status antropometri TB/U di bawah normal, yaitu anak dengan kategori pendek dan sangat pendek, yang disebut *stunting*. Anak yang mengalami stunting pada masa awal kehidupan sampai lima tahun dikhawatirkan tidak akan mencapai potensi fisik dan mental/ kecerdasan yang maksimal pada masa dewasa. Dampak stunting bersifat permanen dan sulit dikembalikan pada jalur pertumbuhan potensialnya. Anak yang sudah terlanjur pendek (stunted) akan menurun potensi fisiknya, sehingga menghambat potensi-potensi kemampuan/ ketrampilan lainnya yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup selanjutnya. Demikian pula anak yang stunted juga merepresentasikan menurunnya kecerdasan. Akibatnya pada

masa berikutnya akan memiliki kemampuan kognitif yang rendah yang menyebabkan kualitas kerja yang tidak kompetitif sehingga mempengaruhi rendahnya produktifitas ekonomi. Tingginya prevalensi stunting di Indonesia dan di Jawa Tengah pada khususnya yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, maka dikhawatirkan akan terjadi “*lost generation*” pada masa yang akan datang.

Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi dengan prevalensi kebutaan yang sangat tinggi, yaitu 3%, mendekati angka nasional. Dari angka tersebut, 81% diantaranya adalah karena katarak, gangguan penglihatan yang dapat dihindari.

2. Peningkatan mutu dan akses pelayanan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) menurut jenis pelayanannya terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta. Salah satu indikator penilaian mutu fasyankes adalah dengan akreditasi baik di tatanan pelayanan kesehatan rujukan maupun di pelayanan kesehatan dasar.

Tahun 2023 Puskesmas terakreditasi sudah mencapai 99,21% (874) dari total 881 Puskesmas masih tersisa 7 Puskesmas yang belum terakreditasi karena habis masa akreditasi dan ada puskesmas baru. RS terakreditasi mencapai 95,35% (328 RS) dari jumlah 344 RS. Data tersebut menjadi awal untuk meningkatkan standar mutu bagi fasyankes dasar dan rujukan dengan tetap memprioritaskan tindakan terhadap keselamatan pasien. Rendahnya mutu pelayanan Kesehatan disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan strategis di puskesmas dan RS serta pemenuhan sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga belum memenuhi standar pelayanan.

3. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan

Paradigma sehat merupakan upaya untuk merubah pola pikir *stakeholder* dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif–preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penerapan paradigma sehat dilakukan

dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat. Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting, mengingat tidak ada satupun tindakan manusia termasuk upaya pembangunan yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Bahkan semua kebijakan dan kegiatan pembangunan juga akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia.

Penguatan promotif dan preventif dilakukan dengan mengoptimalkan Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan Gernas antara lain, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktifitas penduduk dan mengurangi beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Hal ini mengingat terjadi perubahan penyakit terkait dengan faktor perilaku. Keluarga sebagai fokus pemberdayaan. Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri dari ayah, ibu dan anak yang disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek/nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah (misalnya asisten rumah tangga) disebut keluarga luas. Oleh karena merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari fungsi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dari Puskesmas. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan merupakan kelanjutan dari pemberdayaan keluarga melalui pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas terdapat 8 UPT Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi

serta Tata Kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. UPT Dinas Kesehatan yaitu:

1. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
2. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
3. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
4. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
5. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
6. Balai Kesehatan Indra Masyarakat
7. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan
8. Balai Pelatihan Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagai berikut :

1. Data Kepegawaian :
 - a. Pegawai berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan.

Jumlah tenaga aktif di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 542

orang. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan di lingkup Dinas Kesehatan dan UPT tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	INSTITUSI	Jabatan			Jumlah tenaga Aktif
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinkes Prov. Jateng	9	79	92	180
2	Balkesmas Semarang	0	52	12	64
3	Balkesmas Magelang	2	35	13	50
4	Balkesmas Pati	1	30	13	44
5	Balkesmas Klaten	0	32	9	41
6	Balkesmas Ambarawa	2	25	10	37
7	Bkim Provinsi Jateng	2	37	10	49
8	Balai Labkes & PAK Semarang	1	37	13	51
9	Bapelkes Gombong	2	6	18	26
	JUMLAH	19	333	190	542

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jumlah tenaga aktif yang menjabat sebagai pejabat struktural sebanyak 19 orang, pejabat fungsional 333 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 190 orang. Banyaknya tenaga fungsional di Dinas Kesehatan dan UPT karena adanya kesempatan menjadi pejabat fungsional secara *impassing* pada tahun 2020.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	INSTITUSI	TINGKAT PENDIDIKAN											JML
		S3	S2	S1	D4	D3	Sar mud	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Dinkes Prov. Jateng	1	73	70	1	12	1	0	0	17	5	0	180
2	Balkesmas Semarang	0	8	25	6	18	1	0	0	5	1	0	64
3	Balkesmas Magelang	0	9	11	0	17	0	0	0	11	1	1	50
4	Balkesmas Pati	0	4	13	5	13	1	0	0	7	0	1	44
5	Balkesmas Klaten	0	9	8	0	20	1	0	0	3	0	0	41
6	Balkesmas Ambarawa	0	7	11	1	12	1	0	0	2	3	0	37
7	Bkim Provinsi Jateng	0	10	11	0	23	0	0	0	4	1	0	49
8	Balai Labkes & PAK Semarang	0	8	14	3	21	0	0	0	4	1	0	51
9	Bapelkes Gombong	1	6	7	0	3	0	0	0	8	1	0	26

NO	INSTITUSI	TINGKAT PENDIDIKAN											
		S3	S2	S1	D4	D3	Sar mud	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
	JUMLAH	2	134	170	16	139	5	0	0	61	13	0	542

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT yang telah lulus menempuh pendidikan S3 sebanyak 2 orang, lulusan S2 sebanyak 134, lulusan S1 sebanyak 170 orang, D4 sebanyak 16 orang, Diploma 3 sebanyak 139 orang, Sarjana Muda 5 orang, SLTA sebanyak 61 orang, dan SLTP sebanyak 13 orang. Adanya pegawai Dinkes yang melanjutkan studi jenjang S-3 dan S-2 karena adanya kesempatan dari BKD provinsi dengan sumber dana dari APBD Provinsi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	KETERANGAN	SALDO AKHIR	
		Jml.	Harga
1	Tanah	24	61,099,740,000
2	Alat besar	45	6,299,440,825
3	Alat angkutan	131	33,404,114,918
4	Alat bengkel dan alat ukur	100	3,034,635,934
5	Alat pertanian	1	11,600,000
6	Alat kantor dan rumah tangga	10,486	48,447,073,780
7	Alat studio komunikasi dan pemancar	929	6,615,003,609
8	Alat kedokteran dan alat kesehatan	3,040	109,836,747,676
9	Alat laboratorium	787	55,457,032,416
10	Alat persenjataan	1	9,205,000
11	Alat komputer	2,212	19,082,981,209
12	Alat eksplorasi	1	1,800,000
13	Alat keselamatan kerja	8	153,375,000
14	Alat peraga	7	80,534,300
15	Peralatan proses/produksi	10	22,500,000
16	Peralatan olah raga	20	96,729,600
17	Bangunan gedung	83	136,661,933,022

NO	KETERANGAN	SALDO AKHIR	
		Jml.	Harga
18	Monumen	2	144,162,000
19	Tugu titik kontrol/pasti	4	4,933,166,740
20	Jalan dan jembatan	1	57,825,000
21	Bangunan air	9	835,756,500
22	Instalasi	36	3,745,644,564
23	Jaringan	16	904,771,228
24	Bahan perpustakaan	1,157	232,446,464
25	Barang bercorak keseniaan/kebudayaan/olah raga	102	105,951,000
26	Hewan	4	7,300,000
27	Tanaman	1	34,650,000
28	Konstruksi dalam pengerjaan	4	1,143,700,220
	Jumlah aset	19,221	492,459,821,005

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

Aset Dinas Kesehatan tahun 2023 sebanyak 28 jenis dengan jumlah Saldo akhir sebesar Rp.492.459.821.005,00 mengalami penambahan dibanding aset tahun 2022 sejumlah Rp.398.871.038.310,00,-. Penambahan terjadi antara lain karena ada pengadaan belanja modal pada alat kedokteran dan kesehatan, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat komputer, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan penambahan bangunan gedung.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah terdiri dari 881 puskesmas (508 puskesmas non rawat inap dan 375 puskesmas rawat inap), 13 balai kesehatan, 194 laboratorium kesehatan (34 daerah milik pemerintah dan 160 milik swasta) dan 344 RS dengan 328 RS telah terakreditasi (305 Paripurna, 20 Utama dan 3 Madya). Dukungan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan berupa sarana produksi/industri: penyalur alat Kesehatan 90, perbekalan Kesehatan rumah tangga 92, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 115, Kosmetika 50, industri farmasi 21, produksi alat Kesehatan 109, dan industri obat tradisional/ekstrak bahan alami (IOT/EBA) 17/7. Sarana penyalur berupa: Cabang Penyalur Alkes 88, cabang pedagang besar farmasi 143, apotik 4.013, toko obat 381 dan toko alat Kesehatan 82.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, isu-isu strategis, mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sistematika penulisan dan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 dan Langkah perbaikan internal di OPD serta tindak lanjut atas rekomendasi LKjIP tahun 2022.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan, perjanjian kinerja dan instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti GRMS dan aplikasi lokal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran, inovasi dan penghargaan yang diraih tahun 2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan kinerja.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Laporan hasil evaluasi terhadap SAKIP Tahun 2023 di Dinas Kesehatan telah ditindaklanjuti dan tuntas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Tindaklanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyelaraskan target pada dokumen Perencanaan Kinerja yang ada di Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja dengan yang ada di <i>e-planning</i> dan <i>e-controlling</i>	Kepala Dinas membuat surat Nota Dinas nomor 700.0/10240 tanggal 13 September 2023 perihal hasil evaluasi atas SAKIP Tahun 2023 kepada seluruh eselon III Dinkes dan UPT untuk: 1. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan segera setelah DPA Perubahan ditetapkan. Target kinerja dan anggaran agar disesuaikan dengan <i>e-planning</i> dan <i>e-controlling</i> . (Format PK Perubahan tahun 2023 terlampir). Dokumen PK Perubahan agar dikirimkan ke Subag program dalam bentuk hardcopy dan file PDF maksimal 1 minggu setelah DPA P ditetapkan 2. Menyelaraskan antara permasalahan Pencapaian Kinerja dengan uraian rekomendasi pada dokumen Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT dan Kepala Subag/TU/Subkoordinator tahun 2023. Dokumen LKj agar dikirimkan ke Subag Program maksimal minggu IV bulan Januari 2024
2.	Menyelaraskan antara permasalahan Pencapaian Kinerja dengan uraian rekomendasi pada Bab IV dokumen LKjIP tahun berjalan	
3	Melaksanakan proses percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP pada tahun berjalan.	

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT

1.7 Tindaklanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2022

Rekomendasi atas LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Tindaklanjut atas Rekomendasi LKjIP
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Rumah Sakit Rujukan Provinsi agar melakukan pendampingan ke RS Kab/Kota di wilayahnya. Kegiatan pendampingan RS ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola klinis dan tata kelola manajemen di RS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pendampingan dilakukan dengan menugaskan secara tim yang terdiri dari dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak, bidan perawat, tenaga elektromedis dan manajemen rumah sakit	Kegiatan yang dilakukan sesuai DPA th 2023 oleh RS provinsi terkait penurunan AKI, AKB dan AKABA sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan RSUD dr Adhyatma, MPH untuk program Ponek di Puskesmas Mangkang, Puskesmas Tambakaji dan Puskesmas Karangmalang 2. Pendampingan dari RSUD Dr. Rehata Jepara, melaksanakan kegiatan advokasi kesehatan, bakti sosial, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat, kegiatan fokus untuk bakti sosial dan mengedukasi serta screening dengan sasaran ibu hamil risiko tinggi dengan pelayanan USG gratis yang dilaksanakan melalui program 'Safari USG' di Puskesmas sekitar wilayah RSUD dr. Rehata, meliputi Puskesmas Keling, Puskesmas Donorojo, Puskesmas Kembang dan Puskesmas Bangsri 3. Pendampingan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo di RSUD Cilacap, RSUD Purbalingga dan RSUD Brebes berupa pendampingan PONEK
2	Peningkatan keterlibatan peran dokter spesialis obsgyn (POGI) dan dokter spesialis anak (IDAI) dalam penurunan Angka kematian Ibu	Kegiatan yang dilakukan sesuai DPA th 2023 terkait penurunan kematian ibu, bayi dan balita dengan melibatkan organisasi profesi adalah:

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
	<p>terutama pada saat melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP). AMP adalah serangkaian penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan dan kematian serupa dimasa yang akan datang. Peran aktif POGI dan IDAI antara lain sebagai fasilitator dalam pelatihan AMP, memberikan rekomendasi temuan AMP, mewajibkan setiap anggota POGI ikut aktif pada setiap kegiatan AMP. Rekomendasi AMP agar dilaksanakan dengan optimal di kab/kota yang bersangkutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kualitas pelayanan persalinan di Kab//Kota (Rp.150.000.000) 2. Penguatan Baseline Data Maternal Neonatal di Kab/Kota (Rp.243.677.000) 3. Penguatan strategi penurunan kasus kematian ibu melalui tidak lanjut AMP di Kab/Kota (Rp. 255.261.000) 4. Verifikasi baseline data kematian bayi dan balita di Kab/Kota (Rp.150.000.000) 5. Penguatan Pelayanan Balita dan anak Pra sekolah di Kab/Kota (Rp.72.650.000) 6. Penguatan program Keluarga Berencana di Kab/Kota (Rp.46.800.000) 7. Penguatan Gerakan 5 NG di Kab/Kota (Rp.73.177.000) 8. Konsinyering Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat (Rp. 125.256.000) 9. Konsinyering Kajian Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Masalah Gizi (Rp. 31.560.000) 10. Monitoring, Evaluasi, Koordinasi Proram Kesehatan Keluarga dan Gizi (Rp. 146.644.000) 11. Penguatan tata laksana gizi kurang dan gizi buruk pada balita (Rp.97.200.000) 12. Konsolidasi Lintas Sektor dalam rangka Upaya Penurunan AKI, AKB, dan Masalah Gizi (Rp.16.890.000)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan lanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna dari visi sebagai berikut:

Sejahtera: terbebas dari ketidak-merdekaan, karena kebodohan, kesakitan, kelaparan, kepanasan dan kehujan, hubungan sosial yang tidak nyaman dan diskriminasi-sara-miskin-gaptek-isolasi-bodo-defabel-gender, atau karena jeleknya infrastruktur-fisik-sosial ekonomi budaya. Ringkasnya ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat sesuai peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Berdikari: metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri-Sumber Daya Alam-Sumber Daya Manusia-Sumber Daya budaya-Sumber Daya sosial-Sumber Daya ekonomi, sedang modal dari luar merupakan tambahan. Berdikari juga merupakan tujuan agar masyarakat mampu memenuhi ketercukupan kebutuhan pokok sendiri.

Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi merupakan laku masyarakat Jawa Tengah agar dapat mencapai visi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, dan Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kesehatan dengan indikator nilai kepuasan masyarakat, maka ada 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu :

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran :
 - 1) AKI (Angka Kematian Ibu)
 - 2) AKB (Angka Kematian Bayi)
 - 3) AKABA (Angka Kematian Balita)
 - 4) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - 5) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 6) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
 - 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
 - 8) Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran:
 - 1) Nilai SAKIP
3. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Nilai kepuasan masyarakat

Tabel 2.1
Indikator Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					RKPD 2023	AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,09	74,1	74,1	74,59	74,72	74,72	74,1
	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000/KH	87	85,5	99	120	100	100	81
		Angka Kematian Bayi (AKB)	100.000/KH	8,3	8,1	8	7,9	7,8	7,8	7,8
		Angka Kematian Balita (AKABA)	1.000/KH	10,47	10,45	10,45	10,45	10,43	9,2	10,43
		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	52	57	85	85	86,43	86,43	72
		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	50	52	55	57	60	60	60
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	45	51	57	63	69	69	69
		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,20	0,23	0,19	0,20	0,21	0,21	0,32
Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kesehatan		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	77	82	85	85,5	86	86	85
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	72	74	87	87	87,1	87,1	80
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai kepuasan masyarakat	Angka	77	82	85	85,5	86	86	85

Sumber data : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Berdasarkan table 2.1 diatas terdapat perbedaan target pada RPJMD murni dan RKPD 2023 yaitu pada indikator:

1. Angka Harapan Hidup: perubahan target pada AHH karena pada tahun ke-2 Renstra, target telah tercapai sehingga mengusulkan untuk perubahan target dengan menaikkan target menjadi 74,72.
2. Angka Kematian Ibu: perubahan target pada AKI karena terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan kematian ibu yang meningkat tajam pada tahun 2021 sebesar 199/100.000 KH, sehingga perlu diturunkan targetnya menjadi 100/100.000 KH
3. Angka Kematian Balita: perubahan target dilakukan karena pada tahun ke-3 RPJMD target akhir telah tercapai sehingga dilakukan perubahan target dengan menurunkan menjadi 9,2/1.000 KH
4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular: perubahan target dilakukan karena pada tahun ke-2 RPJMD target akhir telah tercapai sehingga dilakukan perubahan target dengan menaikkan menjadi 85,71
5. Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi: perubahan target karena penentuan target awal yang terlalu optimis. Kenyataan di lapangan untuk mendapatkan indeks keluarga sehat sangat sulit terutama saat terjadinya pandemic Covid 19 kunjungan ulang untuk intervensi lanjut guna meningkatkan IKS tidak dapat dilakukan dan belum dilakukan update IKS wilayah oleh Kementerian Kesehatan, sehingga perlu diturunkan targetnya menjadi 2,1 pada tahun 2023.
6. Nilai Kepuasan Masyarakat: pada tahun ke-3 RPJMD target akhir telah tercapai sehingga dilakukan perubahan menaikkan target menjadi 85,5
7. Nilai SAKIP: perubahan target dilakukan karena capaian pada tahun ke-2 RPJMD target akhir sudah tercapai sehingga dilakukan perubahan menaikkan target menjadi 87

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam

periode 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan dalam upaya mencapai sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan kebijakan:
 - a. Percepatan *Universal Health Coverage (UHC)*
 - b. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
 - c. Optimalisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - d. Health Tourism
 - e. Sinergitas pengelolaan UKM UKP (RS Tanpa dinding)
 - f. Pembinaan dan pengawas pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - g. Penanganan permasalahan kasus kesehatan masyarakat yang merupakan kasus rujukan
2. Peningkatan upaya paradigma sehat dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lintas sektor
 - c. Peningkatan kesehatan keluarga
 - d. Peningkatan kesehatan lingkungan
 - e. Peningkatan kesehatan kerja dan Olah Raga
 - f. Peningkatan gizi masyarakat utamanya pencegahan dan penanggulangan stunting dan gizi buruk
 - g. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan kebijakan:
 - a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa
 - b. Peningkatan surveilans ketat dan kewaspadaan dini
 - c. Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi
 - d. Penanggulangan Bencana dan KLB serta krisis bencana
4. Pemenuhan sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan dengan kebijakan:
 - a. Penyediaan *buffer stock* obat program
 - b. Pemenuhan sarana prasarana (perbekalan kesehatan) sesuai standar
 - c. Pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian
 - d. Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian

- e. Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman
 - f. Pembinaan dan pengawasan sarana perbekes
5. Peningkatan Kualitas SDM kesehatan dengan kebijakan:
- a. Penguatan perencanaan SDM Kesehatan
 - b. Peningkatan diklat
 - c. Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
 - d. Penguatan koordinasi lintas sektor dan program

Tabel 2.2
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN :			
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,72
SASARAN:			
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	AKI	100
		AKB	7,9
		AKABA	9,20
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	85,71%
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	60%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	69%
		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0,21
TUJUAN :			
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85,5
SASARAN :			
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP	87
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85,5

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Universal Health Coverage (UHC) 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 3. Optimalisasi SPGDT 4. Health Tourism 5. Sinergitas pengelolaan UKM UKP (RS Tanpa Dinding) 6. Bimbingan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal
	Meningkatkan Upaya Paradigma Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Swasta dan Lintas sektor 3. Peningkatan Kesehatan lingkungan 4. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga 5. Peningkatan Gizi masyarakat utamanya pencegahan dan penanggulangan stunting dan gizi buruk 6. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa 2. Peningkatan surveilans ketat dan kewaspadaan dini 3. Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi 4. Penanggulangan Bencana dan KLB serta krisis bencana
	Pemenuhan sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan <i>buffer stock</i> obat program 2. Pemenuhan sarana prasarana (perbekalan kesehatan) sesuai standar 3. Pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian 4. Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian 5. Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman 6. Pembinaan dan pengawasan sarana perbekes
	Peningkatan Kualitas SDM kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perencanaan SDM Kesehatan 2. Peningkatan diklat 3. Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan 4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan program
	Peningkatan mutu yang berorientasi pada " <i>patient safety</i> "	Mendorong peningkatan mutu yang berorientasi pada patient safety melalui (standar ISO, akreditasi nasional (KARS) atau Internasional (JCIA).

Sumber data : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)		(4)
TUJUAN :				
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	angka	74,72
SASARAN:				
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	AKI	angka	100
		AKB	angka	7,8
		AKABA	angka	9,20
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	persen	85,71%
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	persen	60%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	persen	100%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	persen	69%
		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	angka	0,21

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
TUJUAN :				
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	85,5
SASARAN :				
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP	angka	87
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	85,5

Mendasarkan pada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 bahwa Dinas Kesehatan melaksanakan 4 (empat) program utama dengan 8 kegiatan dan 1 (satu) program penunjang dengan 8 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Struktur Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.1		Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng	55,55	21.010.000
1.2		Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin	75	40.369.474.000
1.3		Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang	12	1.853.800.000
1.4		Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa	12	5.740.000.000
1.5		Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang	12	1.639.000.000

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
1.6		Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten	12	4.030.652.000
1.7		Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati	12	3.735.920.000
1.8		Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM	12	69.931.965.000
1.9		Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK	12	12.388.303.000
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
2.1		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik	100	1.187.200.000
2.2		% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	100	906.504.000
2.3		% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	62,80	380.517.000
2.4		% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	88,60	296.644.000
2.5		% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	60	72.650.000
2.6		% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk < 0,05%	28,57	451.140.000
2.7		% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%	88,57	118.353.000
2.8		% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5%	31,42	46.800.000
2.9		Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 %	30	170.244.000
2.10		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza	88	9.580.856.000
2.11		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular	95	1.599.450.000

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
2.12		Persentase Uci Desa	99,96	690.310.000
2.13		Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam	100	1.675.690.000
2.14		Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan	85,71	2.237.150.000
2.15		Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	100	450.465.000
2.16		presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS	74,43	382.564.786.000
2.17		Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan	34,29	695.000.000
2.18		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	5	196.000.000
2.19		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	6	666.000.000
2.2		Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Semarang	100	176.000.000
2.21		Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang	86	546.796.000
2.22		Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa	85	691.310.000
2.23		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	6	84.055.000
2.24		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	6	540.945.000
2.25		Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Ambarawa	100	212.000.000
2.26		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..	5	338.000.000
2.27		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	4	170.000.000

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
2.28		Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang	87	301.040.000
2.29		Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Magelang	100	262.000.000
2.3		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	6	150.000.000
2.31		Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	6	47.000.000
2.32		Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Klaten	100	47.660.000
2.33		Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten..	86	606.269.000
2.34		Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	6	236.945.000
2.35		Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	6	182.700.000
2.36		Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati..	83	306.080.000
2.37		Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas pati	100	222.000.000
2.38		Angka kepuasan pelanggan di BKIM	87	107.000.000
2.39		Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	35	10.000.000
2.4		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku	35	909.951.000
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
3.1		Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin	100	863.000.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
4.1		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	100	1.068.198.000
4.2		Persentase pelatihan yang sesuai standart	95	3.515.082.000
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
5	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
5.1		Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	75	548.140.000
6	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			
6.1		Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	65	55.104.000
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
7	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
7.1		Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11%	80	2.798.475.000
7.2		Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	6	185.400.000
7.3		Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	5	200.000.000
7.4		Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	7	250.000.000
7.5		Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	3	150.000.000
7.6		Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati	3	200.000.000
7.7		Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun	11	304.092.000

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
8	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
8.1		Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang	7	1.058.000.000
8.2		Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa	7	836.000.000
8.3		Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang	7	886.000.000
8.4		Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten	7	836.000.000
8.5		Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati	7	886.000.000
8.6		Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM	15	210.000.000
8.7		Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK	5	117.785.000
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1		Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD Sekretariat	100	593.455.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Sekretariat	1	91.151.596.000
2.2		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Balkesmas Wil. Semarang	1	2.047.503.000
2.3		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Balkesmas Wil Ambarawa	12	1.637.307.000
2.4		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Balkesmas Wil Magelang	1	1.478.261.000
2.5		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Balkesmas Wil Klaten	1	1.594.533.000
2.6		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Balkesmas Wil Pati	1	939.255.000
2.7		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah BKIM	12	4.083.469.000
2.8		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Balabkes PAK	1	2.788.952.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
3.1		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat	12	845.260.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
4.1		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sekretariat	1	625.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.1		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Sekretariat	1	3.508.390.000
5.2		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Balkesmas Wil. Semarang	1	821.168.000
5.3		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Balkesmas Wil.Ambarawa	12	635.550.000
5.4		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Balkesmas Wil.Magelang	1	868.890.000
5.5		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Balkesmas Wil.Klaten	1	746.174.000
5.6		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Balkesmas Wil.Pati	1	1.051.875.000
5.7		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah BKIM	12	884.647.000
5.8		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Balabkes PAK	1	1.552.981.000
5.9		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bapelkes	1	944.113.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6.1		Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat	1	487.300.000
6.2		Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah Balkesmas Wil. Semarang	1	728.690.000
6.3		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Balkesmas Wil. Ambarawa	12	536.000.000
6.4		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Balkesmas Wil. Magelang	1	912.376.000
6.5		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Balkesmas Wil. Klaten	1	565.000.000
6.6		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Balkesmas Wil. Pati	1	556.400.000
6.7		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BKIM	12	499.160.000

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
6.8		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bapelkes	1	1.685.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat	1	8.252.889.000
7.2		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Balkesmas Wil. Semarang	1	1.452.200.000
7.3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Balkesmas Wil. Ambarawa	12	1.313.500.000
7.4		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Magelang	1	811.624.000
7.5		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Klaten	1	1.260.800.000
7.6		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Pati	1	975.000.000
7.7		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BKIM	12	1.984.315.000
7.8		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balabkes PAK	1	2.433.798.000
7.9		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bapelkes	1	2.258.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.1		Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat	1	2.339.200.000
8.2		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Balkesmas Wil. Semarang	1	1.161.542.000
8.3		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Ambarawa	12	758.950.000
8.4		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Magelang	1	410.000.000
8.5		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Klaten	1	856.000.000
8.6		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balkesmas Wil. Pati	1	1.213.000.000

NO	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
8.7		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BKIM	12	632.493.000
8.8		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balabkes PAK	1	1.150.000.000
8.9		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Bapelkes	1	1.473.000.000

Sumber data : DPPA P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 4 program utama dengan 8 kegiatan dan 1 program penunjang dengan 8 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi dan APBN. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersumber APBD Provinsi sebelum perubahan sebesar Rp.776.674.367.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Setelah anggaran perubahan, APBD Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.720.315.526.000,- (Tujuh ratus dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), sedangkan jumlah anggaran bersumber APBN/ Dekonsentrasi awal sebesar Rp.22.344.574.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setelah dilakukan refocusing menjadi Rp.17.487.195.000,- (tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah seluruh anggaran setelah perubahan sebesar Rp.737.802.721.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

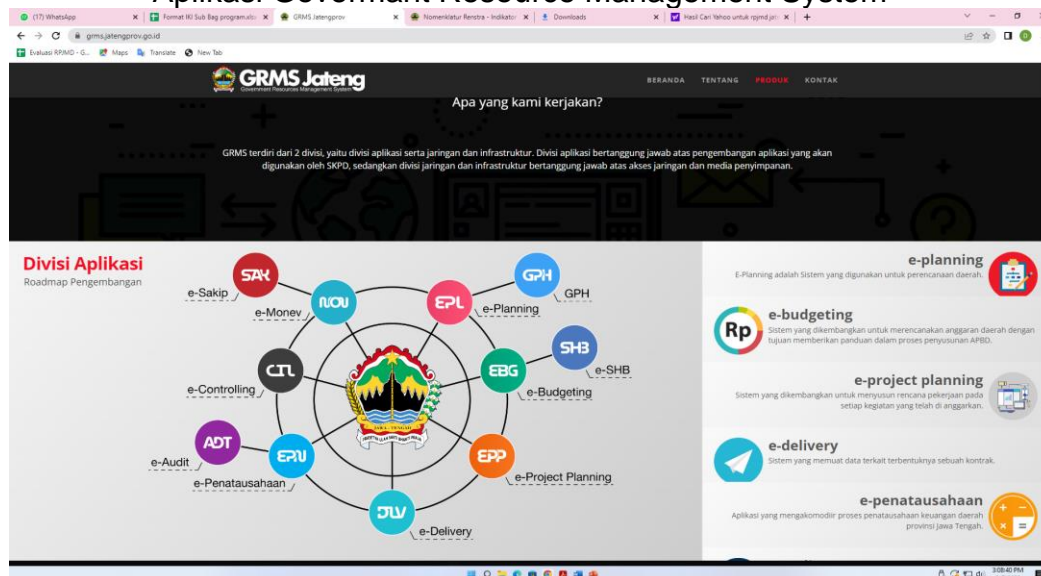
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah adalah aplikasi Government Resource Management System (GRMS) yang mengintegrasikan:

1. e-planning: sistem yang digunakan untuk perencanaan daerah

2. e-budgetting: system yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD
3. e-project planning: system yang dikembangkan untuk Menyusun rencana pekerjaan pada setiap kegiatan yang telah dianggarkan
4. e-delivery: system yang memuat data terkait terbentuknya sebuah kontrak
5. e-penatausahaan: aplikasi yang mengakomodir proses penatausahaan keuangan daerah
6. e-audit: system yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa realisasi kegiatan
7. e-controlling: system yang mencatat pengendalian pelaksanaan kegiatan di pemerintah, dan evaluasi capaian kinerja bulanan, tribulanan, semesteran dan tahunan OPD
8. e-monev: aplikasi yang memuat data target dan realisasi penganggaran seluruh SKPD
9. e-sakip: system yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
10. e-shb: system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga dari suatu barang
11. GPH: aplikasi yang digunakan gubernur untuk memantau usulan/perencanaan dari seluruh elemen di Jawa Tengah.

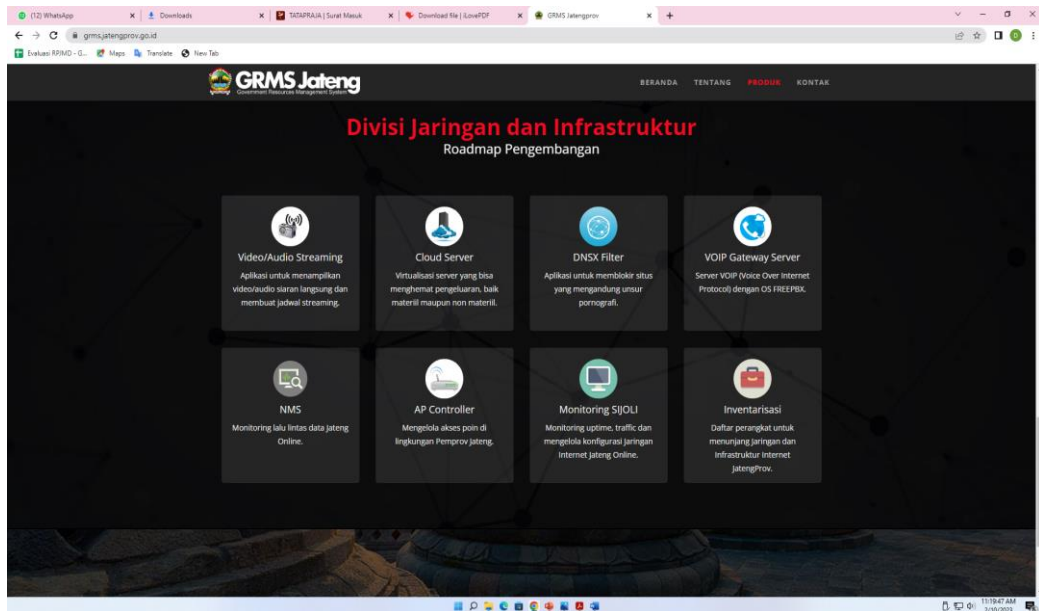
Gambar 2.1
Aplikasi Government Resource Management System



PAIJO GR (Peningkatan Akses layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong). Aplikasi layanan Kesehatan terintegrasi bertujuan meningkatkan akses layanan di UPT Dinas meliputi

registrasi layanan di fasilitas Kesehatan, informasi tentang perijinan, Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis kesehatan (STR TTK), surat ijin dokter spesialis dan informasi tentang tugas belajar. Terdapat juga layanan informasi tentang ketersediaan tempat tidur, profil Kesehatan, buku saku Kesehatan, data dasar Puskesmas dan RS dan layanan konsultasi dokter.

Gambar 2.2
Aplikasi PAIJO GR



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50%

Capaian kinerja utama (kinerja tujuan dan sasaran) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	%	
A	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.72	74.69	99.96	74.1
a)	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian					
1	Angka kematian ibu.	Angka	100.00	88.11	113.49	81
2	Angka kematian bayi	Angka	7.80	9.28	84.05	7.8
3	Angka Kematian Balita	Angka	9.20	10.74	85.66	10.43
4	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian	%	85..71	89.29	104.18	72

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	%	
	penyakit menular					
5	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	60	85.08	141.8	60
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100.00	100.00	100.00	100
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69.00	69.47	100.68	69
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0.21	0.32	152.38	0.32
B	Meningkatkan tata kelola organisasi					
1	Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85.50	89,75	105.59	85.5
a)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja					
1	Nilai SAKIP	Angka	87.00	87.27	100.31	80
b)	Meningkatnya kualitas pelayanan					
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85.50	89.75	105.59	85.5

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

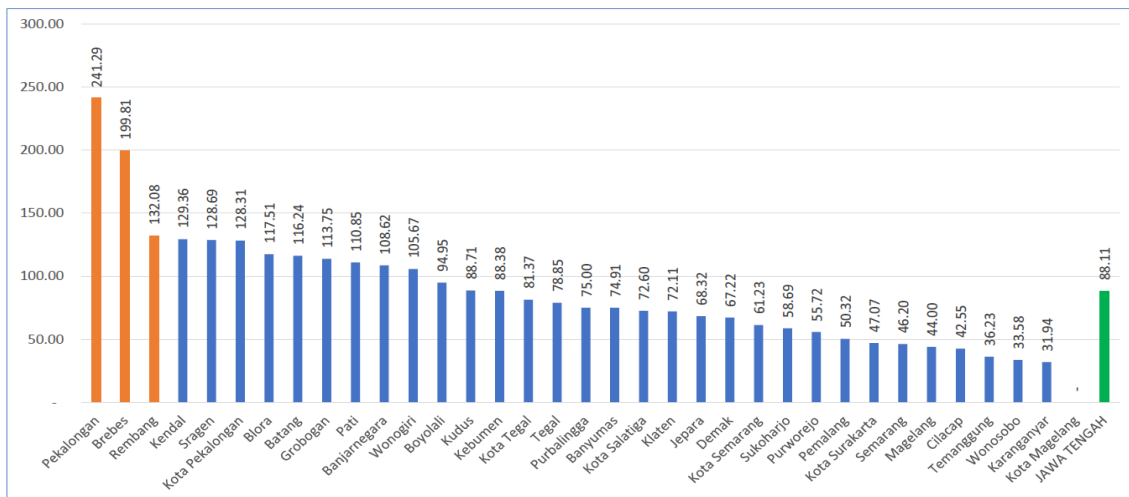
Tujuan Pembangunan Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator tujuan Angka harapan Hidup. Capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 74,69 kurang dari target 74,72 dengan persentase capaian 99,96% dan kategori baik. Berdasarkan rilis Desember 2023 AHH Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 dibawah target 74,72 namun masih diatas rata-rata AHH nasional sebesar 71,6.

Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023, didalamnya terdapat indikator daerah yang terkait dengan kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) diartikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. AHH merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. AHH ditentukan oleh besarnya jumlah

kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Biasanya di negara maju harapan hidup tinggi karena pada umumnya tingkat Kesehatan ibu dan bayinya tinggi, sebaliknya di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat Kesehatan.

Jumlah kasus kematian ibu per kabupaten/kota tahun 2023 terbanyak adalah Kab Brebes yaitu 54 kasus dan Kab Pekalongan sebanyak 34 kasus, sedangkan yang tidak ada kasus kematian ibu adalah Kota Magelang, dapat dilihat pada tabel berikut:

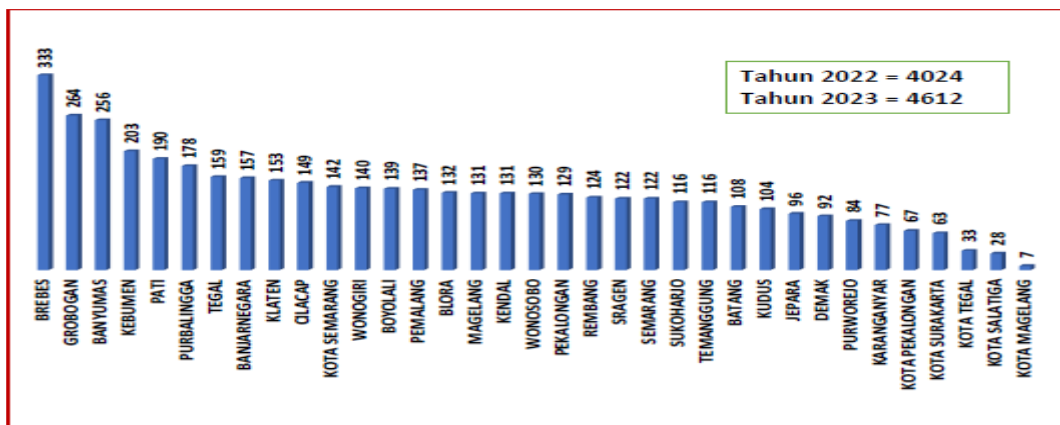
Gambar 3.1
Jumlah kasus kematian ibu per kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jumlah kasus kematian bayi per kabupaten/kota tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian bayi sejumlah 588 kasus di Tahun 2023, jika dibandingkan dengan Tahun 2022, dengan Kab Brebes sebagai penyumbang kematian tertinggi (333 kasus). Tren baru kematian bayi di bulan Desember 2023 naik sejumlah 353 jika dibandingkan dengan bulan Desember 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

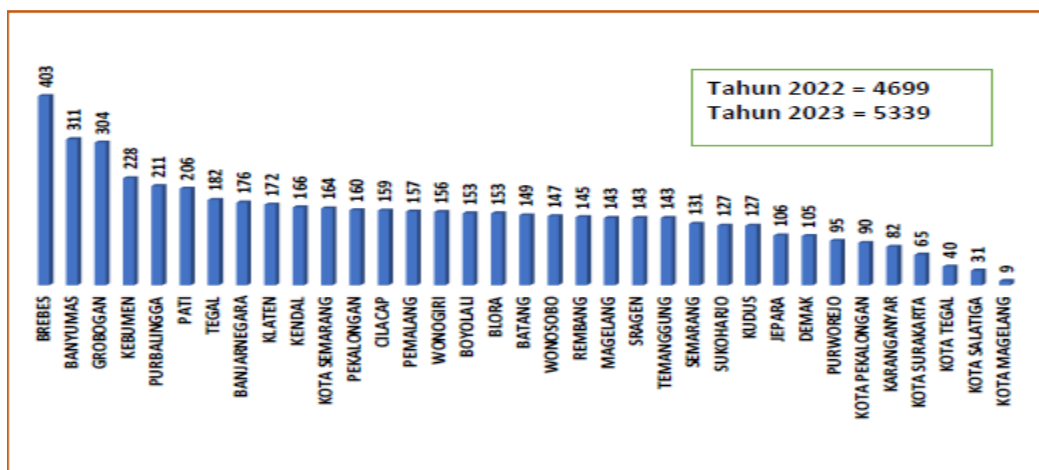
Gambar 3.2
Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jumlah kasus kematian balita per kabupaten/kota tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian balita sejumlah 640 kasus di Tahun 2023, jika dibandingkan dengan Tahun 2022, dengan Kab Brebes sebagai penyumbang kematian tertinggi (403 kasus). Tren baru kematian balita di bulan Desember 2023 naik sejumlah 422 jika dibandingkan dengan bulan Desember 2022, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Jumlah Kasus Kematian Balita Per Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja indikator Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular tahun 2023 sebesar 92,14% melebihi target 85,71% dengan tingkat ketercapaian 107,50%. Capaian ini meningkat

dibanding capaian tahun 2022 89,29% melebihi target 85% dengan Tingkat ketercapaian 105,05.

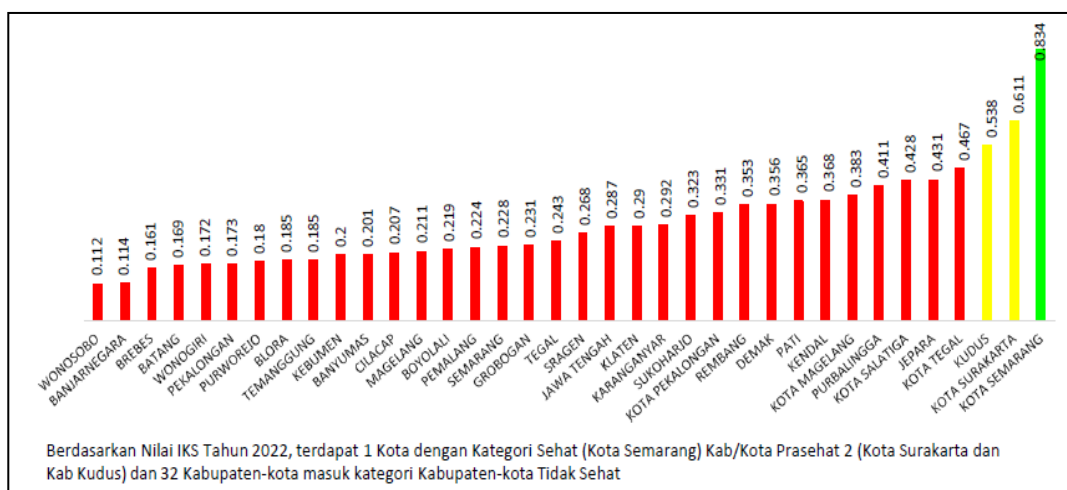
Capaian kinerja indikator Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Tahun 2023 sebesar 74,62% melebihi target 60% dengan tingkat capaian kinerja 124,37% sedikit menurun dibanding capaian tahun 2022 sebesar 85,08% dari target 57% dengan tingkat capaian kinerja 149,26%.

Capaian kinerja persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi adalah Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan target yaitu 100%.

Capaian kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan tahun 2023 sebesar 69,47% melebihi target 69% dengann Tingkat capaian kinerja 100,68%. Capaian ini lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 63% sesuai target dengan Tingkat capaian 100%

Capaian kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2023 realisasi 0,32 melebihi target 0,21 dengan tingkat ketercapaian sebesar 152,38% meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 0,25 dari target 0,20 dengan tingkat capaian 125%

Gambar 3.4
Indeks Keluarga Sehat kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tujuan meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat tercapai sangat baik 104.97% dari target 85,5 realisasi 89,75. Realisasi kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023			KATEGORI	SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	%		
A	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat						
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.72	74.69	99.96	BAIK	BPS
a)	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian						
1	Angka kematian ibu.	Angka	100.00	88.11	113.49	SANGAT BAIK	Kab/kota
2	Angka kematian bayi	Angka	7.8	9.28	84.05	CUKUP	Kab/kota
3	Angka Kematian Balita	Angka	9.2	10.74	85.66	BAIK	Kab/kota
4	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	85.71	89.29	105.05	SANGAT BAIK	Kab/kota
5	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	60.00	74.62	124.37	SANGAT BAIK	Kab/kota
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100.00	100.00	100.00	BAIK	Kab/kota
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69.00	69.47	100.68	SANGAT BAIK	Kab/kota
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0.21	0.32	152.38	SANGAT BAIK	Kab/kota
B	Meningkatkan tata kelola organisasi						
1	Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85.50	89,75	104.97	SANGAT BAIK	Kab/kota
a)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja						
1	Nilai SAKIP	Angka	87.00	87.27	100.31	SANGAT BAIK	Dinkes
b)	Meningkatnya kualitas pelayanan						
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85.50	89.75	104.97	SANGAT BAIK	Dinkes

Sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan 10 (sepuluh) indikator, capaian kinerja sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu, capaian kinerja 88,11/100.000 KH mencapai target 100/100.000 KH, persentase capaian kinerja 113,49% kategori sangat baik
2. Angka Kematian Bayi, capaian kinerja 9,28/1.000 KH kurang dari target 7,8/100.000 KH, persentase capaian kinerja 84,05% kategori cukup
3. Angka Kematian Balita, capaian kinerja 10,74/1.000 KH kurang dari target 10,43/1.000 KH, persentase capaian kinerja 85,66% kategori cukup
4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, capaian kinerja 89,29% melebihi target 85%, persentase capaian kinerja 105,05% kategori sangat baik
5. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, capaian kinerja 74,62% melebihi target 60%, persentase capaian kinerja 124,37% kategori sangat baik.
6. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, capaian kinerja 100% sesuai target, persentase capaian kinerja 100% kategori baik
7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan, capaian kinerja 69,47% melebihi target 69, persentase capaian kinerja 100,68% kategori sangat baik
8. Indeks Keluarga Sehat, capaian kinerja 0,32% melebihi target 0,21%, persentase capaian kinerja 152,38% kategori sangat baik

Sedangkan capaian indikator tujuan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja 89,75% melebihi target 85,5%, persentase capaian kinerja 104,97% kategori sangat baik. Ada 2 sasaran pada tujuan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai SAKIP, capaian kinerja 87,27 melebihi target 87, persentase capaian kinerja 100,31% kategori sangat baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja 89,75 melebihi target 85,5 persentase capaian kinerja 104,97% kategori sangat baik

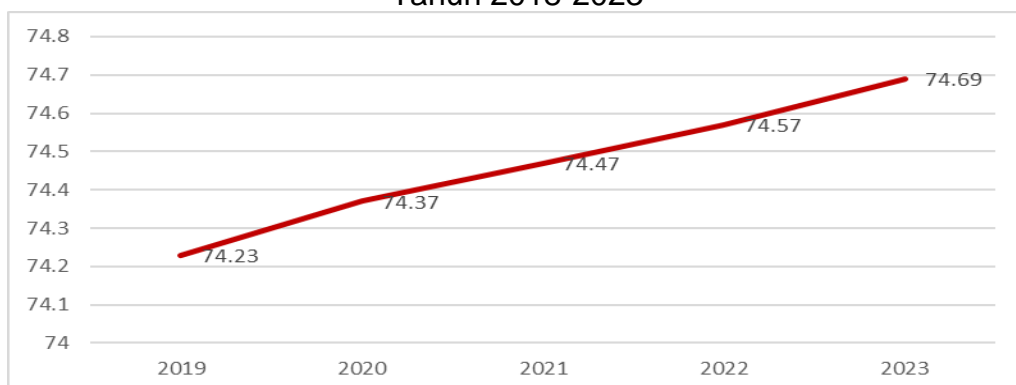
Dari 2 indikator tujuan dan 10 indikator sasaran, realisasi terhadap target kinerja tahun 2023, 1 indikator berkategori cukup (indikator sasaran), 3 indikator berkategori baik (1 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran) dan 8 indikator kategori sangat baik (1 indikator tujuan dan 7 indikator sasaran).

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 tahun (2019-2023)

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah, terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dan meningkatkan tata kelola organisasi dinas Kesehatan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Tren angka harapan hidup selama 5 tahun berturut-turut selalu meningkat, namun apabila dibandingkan dengan target, AHH tahun 2023 tidak bisa mencapai target dengan persentase capaian 99,96%. Walaupun angka ini masih diatas rata-rata AHH nasional sebesar 71,6. Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian kabupaten kota sehat.

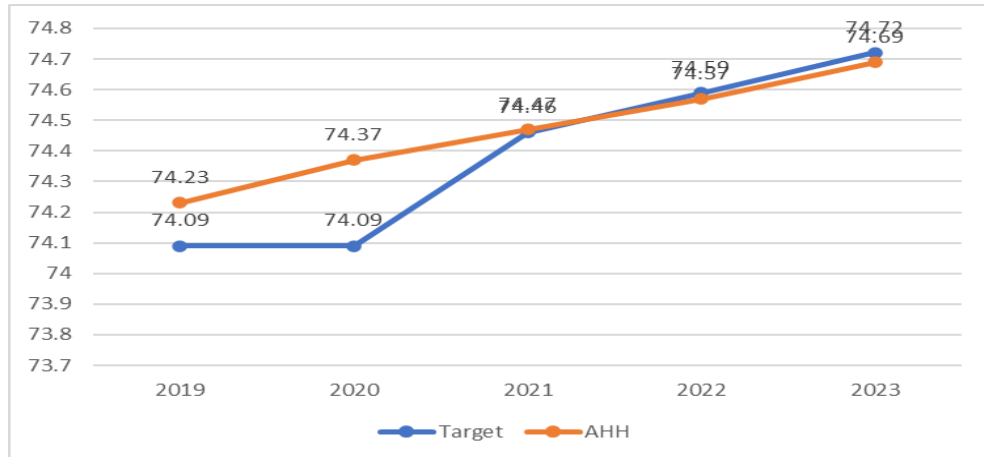
Gambar 3.5
Tren Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi AHH tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

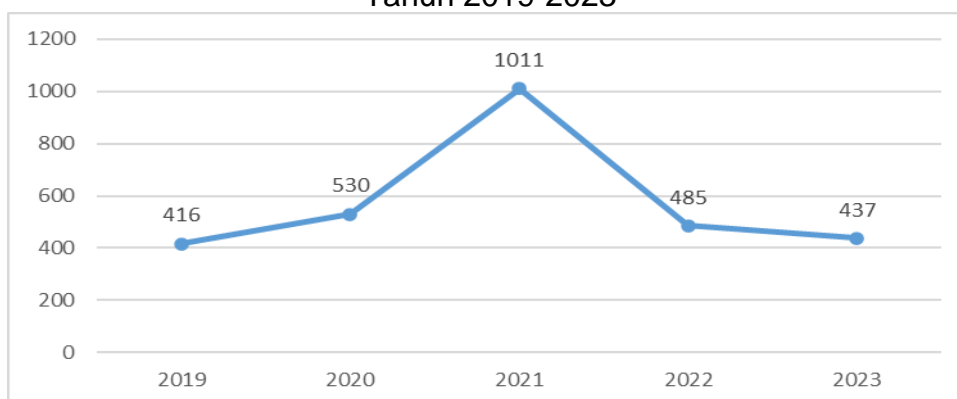
Gambar 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi AHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Angka Kematian Ibu apabila dilihat tren pertahun sejak tahun 2019-2023 sangat fluktuatif. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan AKI di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan, begitu pula kematian ibu pada tahun 2021 meningkat hampir 2 kali lipat kasusnya dan 55,2% diantaranya disebabkan infeksi Covid-19 dan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan. Tahun 2022-2023 jumlah kematian ibu menurun tajam seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19.

Gambar 3.7
Tren Jumlah Kasus Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



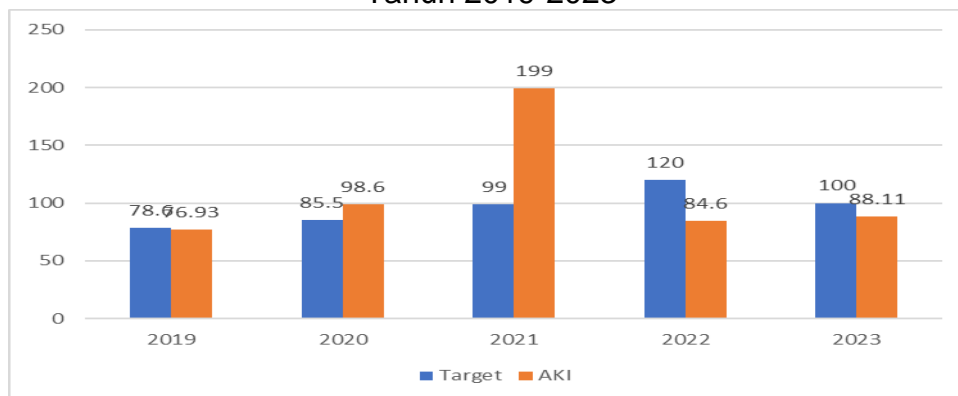
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tren AKI tahun 2019-2023 juga sangat fluktuatif, meningkat sejak tahun 2019-2021, menurun tajam di tahun 2022 dan sedikit meningkat di tahun 2023.

Jumlah kematian absolut pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, namun AKI cenderung meningkat disebabkan jumlah lahir hidup sebagai denominator dalam menghitung AKI mengalami penurunan. Penyebab kematian maternal terbesar disebabkan karena hipertensi/eklamsi, perdarahan, jantung, terjadi infeksi pada masa nifas, gangguan metabolic, gangguan darah, kehamilan ektopik dan abortus. Pemerintah daerah harus tetap memberikan perhatian yang lebih untuk indikator ini dan saat ini masih menjadi prioritas utama masalah kesehatan di Jawa Tengah.

Tren perbandingan target dan realisasi Angka Kematian Ibu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.8
Tren target dan realisasi Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah
Tahun 2019-2023



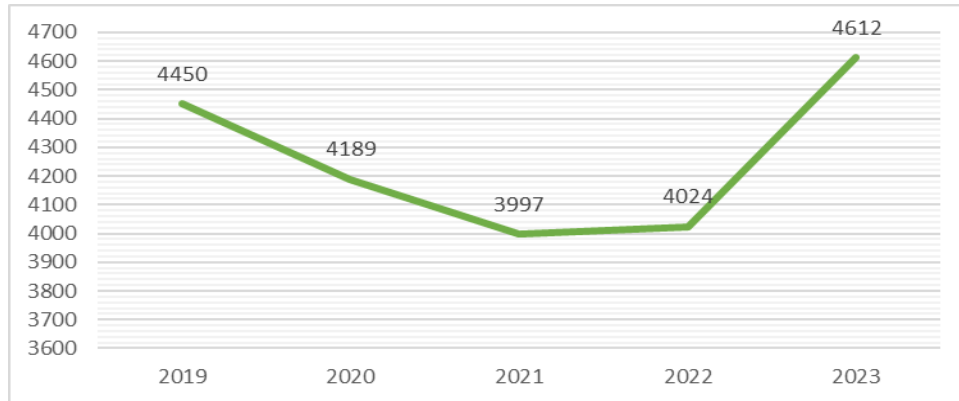
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, Implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian kabupaten kota sehat. Memastikan kabupaten/kota melakukan Upaya peningkatan Kesehatan ibu dan anak serta pelayanan gizi secara optimal dengan melakukan advokasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi program Kesehatan ibu, anak dan gizi sesuai tugas dan kewenangan provinsi. Peningkatan pemahaman dan komitmen khususnya pada keluarga, Masyarakat dan semua sektor untuk terus bekerjasama dalam peningkatan Upaya Kesehatan ibu dan anak.

Tren kasus kematian bayi di Jawa Tengah tahun 2019-2023, pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan, sedikit meningkat pada tahun 2022

dan meningkat tajam di tahun 2023. Tren kasus kematian bayi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.9
Tren Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

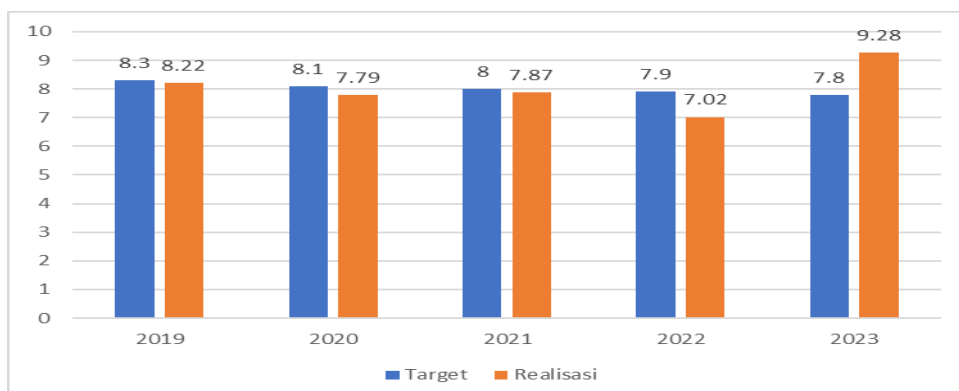


Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kematian bayi dibagi menjadi 2 yaitu kematian neonatal (0-28 hari) dan kematian post neonatal (29 hari -11 bulan). Penyebab kematian neonatal antara lain Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital dan infeksi sedangkan kematian post neonatal disebabkan antara lain kelainan kongenital, pneumonia, kondisi perinatal, diare, penyakit saraf dan kelainan saluran cerna.

Tren perbandingan target dan realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10
Tren target dan realisasi Angka Kematian Bayi di Jawa Tengah Tahun 2019-2023



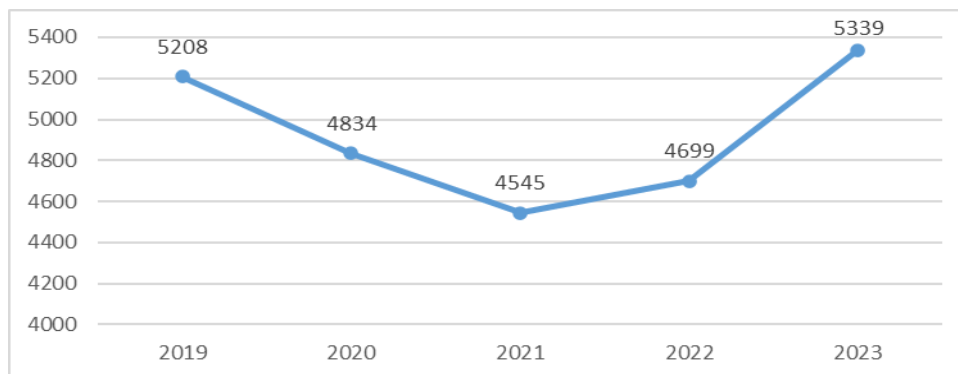
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain: penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana

prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi. Yang menjadi masalah adalah di luar faktor kesehatan yang memerlukan koordinasi peran lintas sektor terhadap penurunan AKB yang tidak bisa dikendalikan dari sisi kesehatan

Tren jumlah kasus kematian balita dari tahun 2019-2023 terlihat fluktuatif, menurun dari tahun 2019-2021 dan perlahan meningkat dari tahun 2022-2023. Berbagai faktor masih harus diselesaikan untuk menyelamatkan balita dari kematian. Hidup balita sangat tergantung pada lingkungannya yang ditentukan oleh orang dewasa. Faktor penyebab kematian Balita antara lain pneumonia, diare, meningitis, kelainan kongenital, gangguan nafas, kardiovaskuler dan lain-lain (kelaianan dan kecelakaan) yang seharusnya dapat diupayakan pencegahannya di sektor kesehatan. Tren jumlah kasus kematian Balita tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

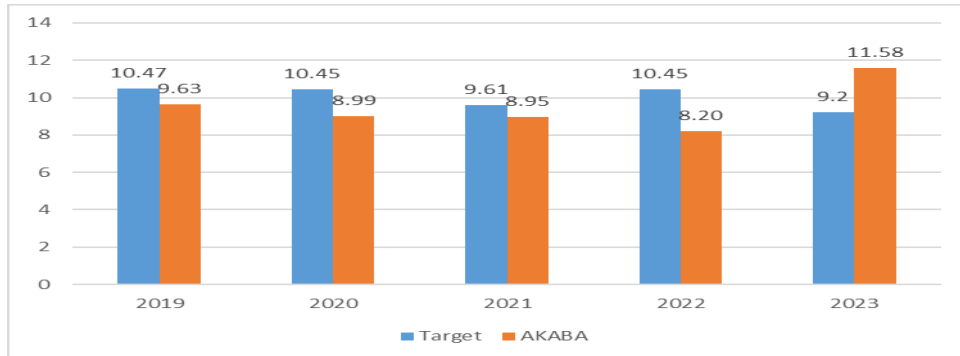
Gambar 3.11
Tren Jumlah Kasus Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tren angka kematian balita dapat dilihat bahwa penurunan AKABA dari tahun 2019-2023 sangat fluktuatif. Seperti pada kasus kematian bayi, kasus kematian balita terjadi karena faktor-faktor internal dari sisi kesehatan sudah dapat teratasi. Yang menjadi masalah sekarang adalah di luar faktor kesehatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor terhadap penurunan AKABA yang tidak bisa dikendalikan dari sisi kesehatan.

Gambar 3.12
Tren Jumlah Kasus Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

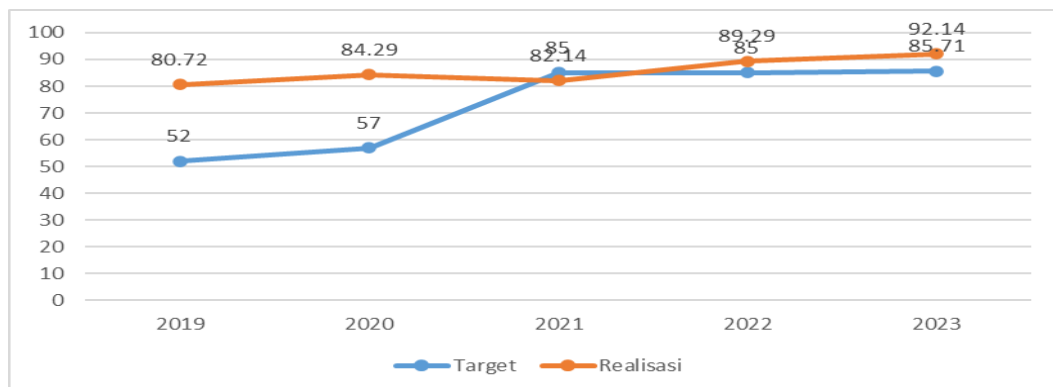


Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah angka yang menunjukkan rata-rata persentase ketercapaian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular prioritas. Indikator kinerja ini merupakan indikator komposit yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian kinerja HIV-AIDS, TBC, Malaria dan DBD.

Capaian kinerja indikator Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 indikator ini tidak tercapai karena adanya pandemi covid, pemberlakuan PPKM dan refocusing anggaran sehingga menyebabkan kegiatan penemuan kasus TB tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan karena adanya kekhawatiran masyarakat apabila melakukan pemeriksaan di faskes akan terinfeksi covid-19.

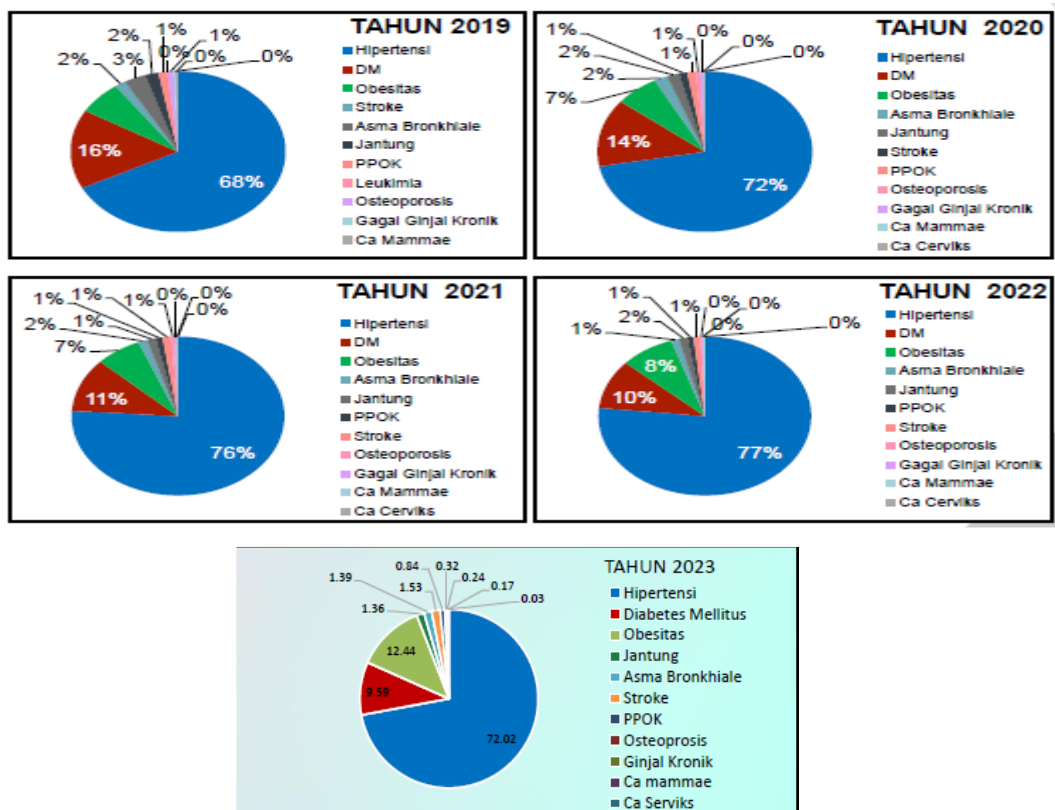
Gambar 3.13
Tren Ketercapaian Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja indikator Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dari tahun 2019-2023 meningkat dan melebihi target. Capaian kinerja indikator Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Tahun 2023 sebesar 91,71% melebihi target 60% dengan tingkat capaian kinerja 124,37% melebihi capaian tahun 2022 sebesar 85,08% dari target 57% dengan tingkat capaian kinerja 149,26%. Hal ini karena adanya akselerasi kegiatan deteksi dini PTM dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kabupaten/Kota yang didanai dari dana dekonsentrasi (APBN).

Gambar 3.14
Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

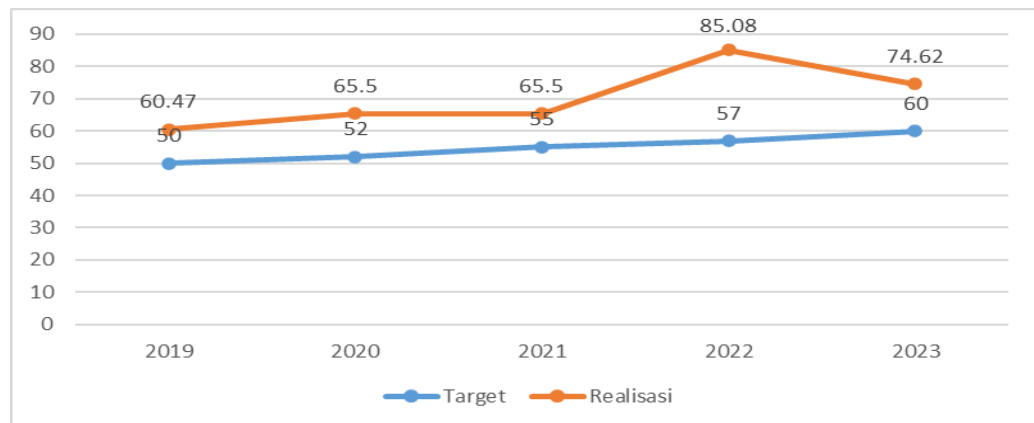


Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa adalah penguatan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian TBC, Kusta, Hepatitis, ISPA, Diare, HIV, AIDS, penguatan dan advokasi pencegahan pengendalian Rabies/GHPR

dengan pendekatan *one health*, penguatan transformasi tatalaksana kasus leptospirosis, penguatan surveilans dan advokasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis, penyelidikan epidemiologi kasus malaria dan Filca, fasilitasi pos pembinaan terpadu (Posbindu) di 4 OPD, pengendalian penyakit tidak menular (PTM) melalui pelayanan terpadu (Pandu) dan pengendalian faktor risiko PTM, gerakan pencegahan penyakit kardiovaskuler, deteksi dini faktor risiko PTM, pengadaan posbindu kit dan antropometri kit, peningkatan kapasitas nakes untuk deteksi dini dan tatalaksana kesehatan jiwa, penguatan dukungan kesehatan jiwa dan psikologis pada saat bencana di 35 kabupaten/kota.

Gambar 3.15
Tren Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi adalah Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi capaian kinerja Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi adalah Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan target yaitu 100%. Indikator ini merupakan indikator yang

mendukung Standar Pelayanan Kesehatan Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2019.

Semua wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana. Selama tahun 2023 telah terjadi bencana banjir, kekeringan dan kebakaran lahan, dengan jumlah terdampak bencana sebanyak 51.775 jiwa, jumlah korban meninggal 3 orang, dan korban mengungsi sebanyak 582 jiwa. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah penanganan bencana melalui Rapid Health Assessment (RHA), penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Rapid Need Assessment (RNA), penguatan sub kluster kesehatan, pembinaan teknis krisis kesehatan akibat bencana.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan, realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 69,47% melebihi target 69% dengan Tingkat ketercapaian 100,68% lebih baik disbanding capaian tahun 2022 sebesar 63% sesuai target dengan tingkat ketercapaian 100%. Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah Pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer dan rujukan, pembinaan dan pengawasan fasyankes primer dan rujukan dalam pemenuhan SPA, pendampingan fasyankes primer dan rujukan dalam pelaksanaan akreditasi dan pendampingan dalam proses perizinan fasyankes.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS PK), merupakan program nasional untuk mencapai Indonesia Sehat. Ada 12 indikator yang telah disepakati dalam Program Indonesia Sehat sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaitu:

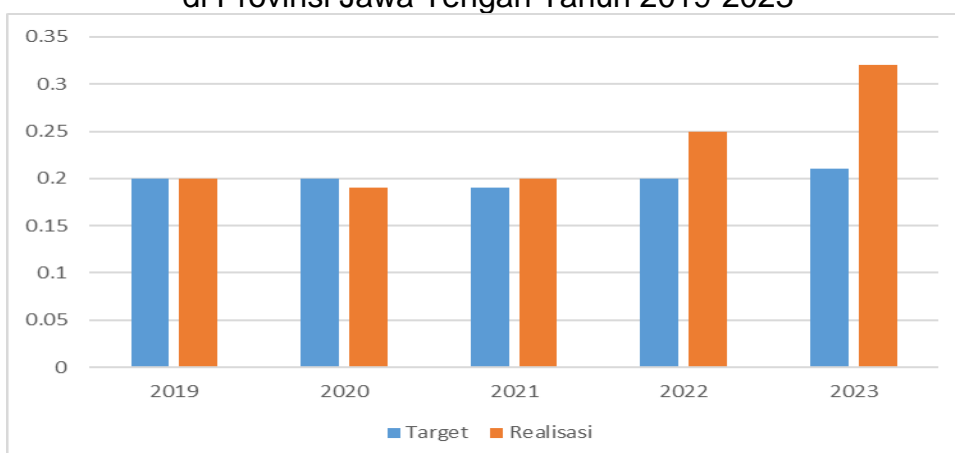
1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu hamil melakukan persalinan di faskes
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Balita dilakukan pemantauan pertumbuhan
5. Bayi mendapat ASI eksklusif
6. Penderita TB mendapat pengobatan

7. Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak merokok
10. Keluarga mendapatkan akses air bersih
11. Keluarga menggunakan jamban sehat
12. Keluarga menjadi anggota JKN

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang merupakan gambaran kesehatan di suatu wilayah. Ada 3 kategori indeks keluarga sehat yaitu: tidak sehat dengan hasil perhitungan 0-0,5, pra sehat dengan hasil perhitungan >0,5-0,8 dan kategori sehat dengan hasil perhitungan >0,8 – 1.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dengan capaian yang rendah, mendorong Puskesmas melakukan kunjungan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Banyak hambatan dalam pelaksanaan PIS PK antara lain ketersediaan dan kualifikasi SDM pada saat melakukan pendekatan keluarga, sarana prasarana, koordinasi dan perilaku masyarakat. Capaian kinerja sasaran IKS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.16
Target dan Realisasi Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Tujuan :																
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.09	74.31	100.12	74.09	74.37	100.38	74.46	74.47	100.01	74.59	74.57	99.97	74.72	74.69	99.96
Sasaran :																
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	78.5	76.93	113.09	85.5	98.6	86.71	99	199	49.75	120.00	84.60	141.84	100	88.11	113.49
	Angka Kematian Bayi	8.3	8.22	100.73	8.1	7.79	103.98	8	7.87	122.11	7.90	7.02	112.54	7.80	9,28	84.05
	Angka Kematian Balita	10.47	9.63	108.5	10.45	8.99	116.24	9.61	8.95	116.76	10.45	8.20	127.44	9.20	10,74	85.66
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	52	80.72	155.23	57	84.29	147.88	85	82.14	96.64	85.00	89.29	105.05	85.71	92.14	107.50
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian	50	60.47	120.94	52	65.5	125.96	55	65.5	119.09	57.00	85.08	149.26	60	91,71	152,85

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa															
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100	100	100.00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	45	46	102.22	57	57	100.00	57	57	100	63.00	63.00	100.00	69	69.47	100.68
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah	0.2	0.2	100	0.2	0.19	95.00	0.19	0.2	105.26	0.20	0.25	125.00	0.21	0.32	152.38

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	Provinsi															
Tujuan :																
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	77	77	100	82	85	103.66	85	85.63	100.74	85.50	89,75	104.97	85.5	87.5	102.34
sasaran :																
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	70	84.88	121.26	74	86.22	116.51	87	87	100	87.00	87.27	100.31	87	87.15	100.17
sasaran :																
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	77	77	100	82	85	103.66	85	85.63	100.74	85.50	89.75	104.97	85.5	87.5	102.34

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD

Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan AHH capaian 74,69 lebih baik dari target RPJMD 74,10 dengan persentase capaian kinerja 100,76%. Indikator sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian mempunyai 8 indikator sasaran dengan capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Angka Kematian Ibu, capaian kinerja 88,11/100.000KH belum mencapai target 81/100.000 KH, prosentase capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 91,93%. Target akhir AKI tidak tercapai. Strategi akselerasi penurunan AKI yaitu:
 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan pendekatan Kontinum of Care dan pemanfaatan buku KIA
 2. Peningkatan program KB dengan menggunakan metode MKJP dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Puskesmas
 3. Penguatan Deteksi dini Ibu hamil dan Intervensi kegiatan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Penguatan Antenatal (K6) dan Persalinan oleh Nakes
 4. Penguatan PONEK, PONEK dan Jejaring Rujukan
 5. Penguatan pemberdayaan masyarakat (posyandu, optimalisasi germas, implementasi 5Ng, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan, perluasan desa siaga dengan penyediaan ambulance desa dan tabungan ibu bersalin)
- 2) Angka Kematian Bayi, capaian kinerja 9,28/1.000 KH kurang dari target 7,80/1.000 KH, prosentase capaian terhadap target akhir 2023 sebesar 84,05%. Target akhir indikator AKB tidak tercapai.
- 3) Angka Kematian Balita, capaian kinerja 10,74/1.000 KH kurang dari target 10,43/1.000 KH, prosentase capaian kinerja terhadap target 2023 sebesar 97,11%. Target akhir indikator AKABA tidak tercapai.
- 4) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, capaian kinerja 94,14% melebihi target 72%, Prosentase capaian kinerja sebesar 127,97%. Capaian ini sudah tercapai dan melebihi target akhir RPJMD sehingga pada RKPD Perubahan 2022 target diperbaharui menjadi 85%.

- 5) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, capaian kinerja 91,71% melebihi target akhir RPJMD sebesar 60%, prosentase capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 152,85%. Capaian kinerja indikator ini sudah tercapai dan melebihi target akhir RPJMD.
- 6) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, capaian kinerja 100% sesuai target akhir tahun RPJMD sebesar 100%, prosentase capaian kinerja terhadap akhir RPJMD sebesar 100% sudah tercapai.
- 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan, capaian kinerja 69,47% melebihi target akhir RPJMD sebesar 69%, prosentase capaian kinerja terhadap akhir RPJMD sebesar 100,68% telah tercapai melebihi target.
- 8) Indeks Keluarga Sehat, capaian kinerja 0,32% sesuai target akhir RPJMD sebesar 0,32%. Prosentase capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 100% telah tercapai sesuai target.

Sedangkan capaian indikator tujuan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja 89,75 melebihi target 85, prosentase capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,59%. Capaian kinerja indikator ini sampai akhir tahun RPJMD sudah tercapai dan melebihi target. Ada 2 sasaran pada tujuan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai SAKIP, capaian kinerja 87,27 lebih tinggi dari target akhir RPJMD sebesar 80, prosentase capaian kinerja dibandingkan target sampai akhir tahun RPJMD sebesar 109,09% telah mencapai dan melebihi target.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Nilai kepuasan masyarakat capaian kinerja 89,75 melebihi target 85, prosentase capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,59%. Capaian kinerja indikator ini sudah tercapai dan melebihi target akhir 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD sebagai berikut: dari 2 indikator kinerja tujuan semuanya telah tercapai dengan

tingkat capaian sesuai dan melebihi target akhir tahun 2023. Dari 10 indikator sasaran, 7 indikator telah mencapai target, 3 indikator tidak mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Akhir RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN	TINGKAT KEMAJUAN
Tujuan :					
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.69	74.10	100,79	TERCAPAI
sasaran :					
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	88,11	81.00	91,93	TIDAK TERCAPAI
	Angka Kematian Bayi	9,28	7.80	84,05	TIDAK TERCAPAI
	Angka Kematian Balita	10,74	10.43	97,11	TIDAK TERCAPAI
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	92,14	75	127,97	TERCAPAI
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	91,71	60.00	152,85	TERCAPAI
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100.00	100.00	100.00	TERCAPAI
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	69,47	69.00	100,68	TERCAPAI
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0.32	0.32	100	TERCAPAI
Tujuan :					
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75	85.00	105.59	TERCAPAI
sasaran :					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	87.27	80.00	109.09	TERCAPAI
sasaran :					
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75	85	105.59	TERCAPAI

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Dari 2 indikator tujuan dan 10 indikator sasaran, hanya ada 4 indikator yang mempunyai target nasional yaitu:

- 1) Angka Harapan Hidup, capaian tahun 2023 sebesar 74,69 jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 71,85, sudah melebihi target nasional dengan persentase capaian 103,95%
- 2) Angka Kematian Ibu, capaian tahun 2023 sebesar 88,11/100.000 KH, jika dibandingkan target nasional 2024 sebesar 183/100.000 KH sudah jauh lebih baik dari target nasional. Persentase capaian terhadap target nasional sebesar 207,69%
- 3) Angka Kematian Bayi, capaian tahun 2023 sebesar 9,28/1.000 KH jika dibandingkan dengan target nasional AKB sebesar 14/1.000 KH maka capaian AKB Jawa Tengah sudah melebihi target nasional. Persentase capaian AKB terhadap target nasional sebesar 150,86%.
- 4) Indeks Keluarga Sehat, capaian 0,32 jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 0,189, maka target IKS Jawa tengah sudah melebihi target nasional. Persentase capaian sebesar 169,31% jauh melebihi target nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	STANDART NASIONAL	% CAPAIAN
Tujuan :				
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.69	71.85	103.95
sasaran :				
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	88,11	183.00 (th 2024)	207,69
	Angka Kematian Bayi	9,28	14.00	150,86
	Angka Kematian Balita	10,74		
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	92,14		
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	91,71		

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	STANDART NASIONAL	% CAPAIAN
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100.00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	69,47		
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0.32	0.189	169,31
Tujuan :				
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75		
sasaran :				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	87.27		
sasaran :				
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75		

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Terdapat 2 indikator tujuan dan 10 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tujuan tidak tercapai yaitu AHH. Pencapaian target AHH dan peningkatan kasus kematian bayi sangat berkaitan karena AHH ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi tinggi/meningkat maka AHH akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/kongenital, penyakit *degenerative*, lingkungan tempat tinggal dan tingkat Kesehatan ibu dan bayi yang rendah karena buruknya tingkat Kesehatan. 1 indikator tujuan dan 7 indikator sasaran telah mencapai/melebihi target yang ditentukan.

Angka kematian Ibu tahun 2023 mencapai target. Faktor pendukung tercapainya AKI adalah adanya akselerasi penurunan AKI dengan strategi:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan pendekatan Kontinum of Care dan pemanfaatan buku KIA
2. Peningkatan program KB dengan menggunakan metode MKJP dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Puskesmas

3. Penguatan Deteksi dini Ibu hamil dan Intervensi kegiatan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Penguatan Antenatal (K6) dan Persalinan oleh Nakes
4. Penguatan PONEK, PONEK dan Jejaring Rujukan
5. Pendampingan AMPSR
6. Penguatan pemberdayaan masyarakat (posyandu, optimalisasi germas, implementasi 5Ng, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan, perluasan desa siaga dengan penyediaan ambulance desa dan tabungan ibu bersalin)

Angka kematian bayi tahun 2023 tidak mencapai target. Jumlah kematian bayi Tahun 2023 sebanyak 4.612 meningkat dibanding jumlah kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 4.024 kasus. Penyebab kematian bayi (neonatal umur 0-28 hari) yang dapat diidentifikasi antara lain: BBLR (39%), Asfiksia (24%), kelainan kongenital (16%), Lain-Lain (16%) dan Infeksi (5%). Penyebab kematian neonatal lain-lain (16%) adalah penyakit paru dan saluran napas (23%), kelainan jantung dan pjb (13%), aspirasi (12%), lainnya (8%), prematur (6%), kejang demam dan demam (5%), ikterik (3%), kelainan dan penyakit saluran cerna (3%), penyakit bag kepala (1%), kelainan darah (1%), penyakit ginjal (1%), aspirasi (1%), DSS, kelainan dan penyakit hepar, kecelakaan. Penyebab lainnya (8%) diantaranya adalah asites, distosia bahu, hipotermi, SIDS, DOA, Elektrolit Imbalance, syok. Penyebab kematian post neonatal (29 hari sd 11 bulan) adalah lain-lain (46%), kelainan kongenital (21%), pneumonia (15%), kondisi perinatal (5%), diare (8%), penyakit saraf (1%), tenggelam cedera kecelakaan (1%), demam berdarah (1%) dan covid. Penyebab lain-lain sebesar 46% terdiri dari penyebab kejang demam dan demam (19%), penyakit paru (16%), lainnya (12%), kelainan jantung dan pjb (11%), belum tahu (10%), aspirasi (7%), kelainan sal cerna dan penyakit sal cerna (7%), infeksi (5%), dehidrasi (3%), kelainan darah (2%), penyakit bag kepala (2%), asfiksia (1%), penyakit ginjal (1%), keganasan (1%) gibur (1%), HIV dan kelainan penyakit hepar.

Angka Kematian Balita tahun 2023 tidak mencapai target. Jumlah kematian balita tahun 2023 sebanyak 5.339 kasus dengan penyebab kematian balita adalah lain-lain (49%), pneumonia (14%), kelainan kongenital jantung dan

(9%), diare (9%), kelainan kongenital lainnya (7%), DBD (5%), tenggelam (3%), penyakit saraf (1%), covid (1%), infeksi parasit (1%), kecelakaan lalu lintas (1%) dan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi). Penyebab kematian lain-lain sebesar 46% terdiri dari kejang demam dan demam (35%), penyakit paru (10%), meningitis (9%), lainnya (9%), kelainan darah (8%), kelainan sal cerna dan penyakit sal cerna (6%), keganasan (5%), infeksi (4%), dehidrasi (3%), aspirasi (3%), kelainan dan penyakit hepar (2%), gibur (1%), belum tahu (1%), asfiksia dan HIV.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita yaitu:

1. Memperkuat upaya perawatan bayi kecil dan rentan, termasuk bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV dan bayi dengan kemungkinan Infeksi Bakteri Berat (PSBI)
2. Penguatan pelayanan kesehatan anak terpadu (MTBS)
3. Penguatan imunisasi Rutin
4. Pendampingan masyarakat pada ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui
5. Penguatan skrining BBL
6. Pengoptimalan pemanfaatan buku KIA terkait kesehatan ibu dan BBL
7. Pendampingan AMPSR
8. Meningkatkan komitmen kab/kota untuk imunisasi dengan melibatkan sektor swasta, komunitas, pemuda, remaja, dan pemimpin agama untuk mengatasi masalah keraguan terhadap vaksin, pengenalan vaksin baru, dan meningkatkan pendekatan HCD
9. Mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis anak
10. Penguatan Pediatric Social Responsibility (PSR) di Kabupaten Kota

Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular tahun 2023 mencapai target. Upaya yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan penemuan kasus TB dengan intensifikasi investigasi kontak;
2. Meningkatkan jejaring dalam temuan kasus TB;
3. Pemeriksaan HIV dengan pendekatan inisiatif petugas Kesehatan di fasyankes bagi kelompok risiko dan populasi khusus seperti ibu hamil, dan pasien TB;
4. Meningkatkan upaya penemuan kasus HIV di populasi kunci;

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan jentik untukantisipasi meningkatnya kasus DBD

Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa tahun 2023 tercapai. Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular melalui upaya promotif
2. Meningkatkan partisipasi wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan melibatkan dukungan lintas sektor dan jejaring kemitraan
3. Meningkatkan upaya promotif dan preventif masalah kesehatan jiwa untuk menurunkan stigma dan mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi gangguan jiwa

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG/ SOLUSI YANG DILAKUKAN
Tujuan:						
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.72	74.69	99.96	Tahun 2023 jumlah kematian bayi meningkat. AHH ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/ kongenital, penyakit degenerative, dan lingkungan tempat tinggal tingkat Kesehatan ibu dan bayi yang rendah karena buruknya tingkat Kesehatan.	Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan bagi usia produktif, ibu, bayi dan balita dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian kabupaten kota sehat
sasaran :						

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG/ SOLUSI YANG DILAKUKAN
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	100	88,11	113,49		Akselerasi penurunan AKI dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan pendekatan Kontinum of Care dan pemanfaatan buku KIA 2. Peningkatan program KB dengan menggunakan metode MKJP dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Puskesmas 3. Penguatan Deteksi dini Ibu hamil dan Intervensi kegiatan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Penguatan Antenatal (K6) dan Persalinan oleh Nakes 4. Penguatan PONED, PONEK dan Jejaring Rujukan 5. Pendampingan AMPSR melalui <i>workshop</i> 6. Penguatan pemberdayaan masyarakat (posyandu, optimalisasi germas, implementasi 5Ng, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan, perluasan desa siaga dengan penyediaan ambulance desa dan tabungan ibu bersalin)
	Angka Kematian Bayi	7.8	9,28	84,05	Penyebab kematian bayi (neonatal umur 0-28 hari) yang dapat diidentifikasi antara lain: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (38%), asfiksia (27%) kelainan <i>congenital</i> 16%, sepsis (3%) dan lain-lain 14% (gangguan nafas, gangguan pencernaan, gangguan kardiovaskuler gangguan saraf dan kecelakaan). Penyebab kematian bayi (29 hari-11 bulan) yaitu: diare (13%), pneumonia (9%), kelainan saluran cerna (6%), kelainan saraf (6%), covid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat upaya perawatan bayi kecil dan rentan, termasuk bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV dan bayi dengan kemungkinan Infeksi Bakteri Berat (PSBI) 2. Penguatan pelayanan kesehatan anak terpadu (MTBS) 3. Penguatan imunisasi Rutin 4. Pendampingan masyarakat pada ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui 5. Penguatan skrining

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG/ SOLUSI YANG DILAKUKAN
					(3%) dan lain-lain (63%) yaitu: gangguan nafas (18%), kelainan congenital (18%), kardiovaskuler (15%), kejang demam (10%), cancer dan kecelakaan	BBL 6. Pengoptimalan pemanfaatan buku KIA terkait kesehatan ibu dan BBL 7. Pendampingan AMPSR 8. Meningkatkan komitmen kab/kota untuk imunisasi dengan melibatkan sektor swasta, komunitas, pemuda, remaja, dan pemimpin agama untuk mengatasi masalah keraguan terhadap vaksin, pengenalan vaksin baru, dan meningkatkan pendekatan HCD 9. Mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis anak 10. Penguatan Pediatric Social Responsibility (PSR) di Kabupaten Kota
	Angka Kematian Balita	9,20	10,74	85,66	Penyebab kematian balita adalah lain-lain (49%), pneumonia (14%), kelainan kongenital jantung dan (9%), diare (9%), kelainan kongenital lainnya (7%), DBD (5%), tenggelam (3%), penyakit saraf (1%), covid (1%), infeksi parasit (1%), kecelakaan lalu lintas (1%) dan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) Penyebab kematian lain- lain sebesar 46% terdiri dari kejang demam dan demam (35%), penyakit paru (10%), meningitis (9%), lainnya (9%), kelainan darah (8%), kelainan sal cerna dan penyakit sal cerna (6%), keganasan (5%), infeksi (4%), dehidrasi (3%), aspirasi (3%),kelainan dan penyakit hepar (2%), gibur (1%), belum tahu (1%), asfiksia dan HIV	
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	85,71	92,14	107,5		1. Meningkatkan penemuan kasus TB dengan intensifikasi infestigasi kontak; 2. Meningkatkan jejaring dalam temuan kasus TB; 3. pemeriksaan HIV dengan pendekatan inisiatif petugas Kesehatan di fasyankes bagi kelompok risiko dan populasi khusus seperti ibu hamil, dan pasien TB; 4. Meningkatkan Upaya penemuan kasus di populasi kunci; 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan jentik untuk antisipasi meningkatnya kasus DBD

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG/ SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	60	91,71	152,85		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular melalui upaya promotif 2. Meningkatkan partisipasi wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan melibatkan dukungan lintas sektor dan jejaring kemitraan 3. Meningkatkan upaya promotif dan preventif masalah kesehatan jiwa untuk menurunkan stigma dan mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi gangguan jiwa.
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100	100.00	100.00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	69	69,47	100.68		
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0.21	0.32	152.38		<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas sudah melakukan intervensi lanjut terintegrasi lintas program 2. Puskesmas sudah melakukan update data hasil intervensi lanjut di aplikasi KS 2.0 3. Adanya dukungan dana dari pemerintah pusat (BOK) maupun APBD 4. Beberapa kabupaten-kota menja IKS menjadi indikator kinerja dinas kesehatan dan masuk dalam indikator

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG/ SOLUSI YANG DILAKUKAN
						penilaian kinerja Puskesmas
Tujuan :						
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	85.00	89,75	105.59		
sasaran :						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	87.00	87.27	100.31		
sasaran :						
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85.00	89,75	105.59		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran APBD(P) sebesar Rp.720.315.526.000,00 realisasi Rp.697.210.911.913 (96.79%). Alokasi tersebut digunakan untuk pencapaian target indikator sebagai berikut:

1. AHH: anggaran untuk pencapaian target AHH sebesar Rp.564.810.910.000,00 realisasi Rp.551.857.202.877,00 (90,02%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.12.953.707.123,00 (9,98%)
2. Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian Balita: anggaran untuk pencapaian target AKI, AKB dan AKABA sebesar Rp. 51.701.445.000,00 realisasi Rp.46.850.165.590,00 (90,62%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.851.279.410,00 (9,38%).
3. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.2.436.450.000,00 realisasi Rp.2.308.080.872,00 (94,73%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.128.369.128,00 (5,27%)
4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa: anggaran untuk pencapaian target

sebesar Rp.11.879.593.000,00 realisasi Rp.11.411.263.285,00 (96,06%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.468.329.715,00 (3,94%).

5. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.3.285.660.000,00 realisasi Rp.3.081.508.915,00 (93,79%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.204.151.085,00 (6,21%).
6. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.494.320.562.000,00 realisasi Rp.487.050.341.748,00 (98,53%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.7.270.220.252,00 (1,47%)
7. Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi: anggaran untuk pencapaian target IKS sebesar Rp.1.187.200.000,00 realisasi Rp.1.155.842.467,00 (97,36%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.31.357.533,00 (3,33%)
8. Nilai Kepuasan Masyarakat: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp. 107.803.090.000,00 realisasi Rp.103.178.910.068,00 (96,98%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.624.179.932,00 (3,02%)
9. Nilai SAKIP: anggaran untuk pencapaian target Nilai SAKIP sebesar Rp.91.745.051.000,00 realisasi Rp.88.596.297.323,00 (96,57%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.3.149.753.677,00 (3,43%)

Analisis terhadap efisiensi sumber daya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7.
Analisis terhadap Efisiensi Sumber Daya terhadap
Pencapaian Tujuan dan Sasaran
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN / INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN	
Tujuan:	Meningkatkan derajat kesehatan						
Angka Harapan Hidup	74.72	74.69	99.96	564.810.910.000	551.857.202.877	90.02	9.98
sasaran :	Menurunnya angka kesakitan dan kematian						
Angka Kematian Ibu	100.00	88.11	113.49	51.701.445.000	46.850.165.590	90.62	9.38
Angka Kematian Bayi	7.8	9.28	84.05				
Angka Kematian Balita	9.2	10.74	85.66				
Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	85.71	89.29	105.05	2.436.450.000	2.308.080.872	94.73	5.27

TUJUAN/ SASARAN / INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN	
Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	60.00	74.62	124.37	11.879.593.000	11.411.263.285	96.06	3.94
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100.00	100.00	100.00	3.285.660.000	3.081.508.915	93.79	6.21
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	69.00	69.47	100.68	494.320.562.000	487.050.341.748	98.53	1.47
Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0.21	0.32	152.38	1.187.200.000	1.155.842.467	97.36	2.64
Tujuan :							
Nilai Kepuasan Masyarakat	85.50	89,75	104.97	107.803.090.000	103.178.910.913	95.71	4.29
sasaran :							
Nilai SAKIP	87.00	87.27	100.31	91.745.051.000	88.595.297.323	96.57	3.43
sasaran :							
Nilai Kepuasan Masyarakat	85.50	89.75	104.97	107.803.090.000	103.178.910.913	95.71	4.29

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan berikut indikator yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung kinerja sasaran:

- 1) Angka Kematian Ibu, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator AKI adalah: Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 %, persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95 %, persentase Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%, persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5%.

- 2) Angka Kematian Bayi, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator AKB adalah: Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi, persentase pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90%, persentase UCI desa.
- 3) Angka Kematian Balita, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator AKABA adalah: Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita, persentase pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90%, persentase Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk < 0,05%.
- 4) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular, Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular, Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Klaten, Balkesmas Magelang dan Balkesmas Pati.
- 5) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan

layanan deteksi dini PTM dan keswa Napza, Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Klaten dan Baleksmas Pati.

- 6) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana < 24 jam, Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Klaten dan Balkesmas Pati.
- 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan indikator ini didukung oleh 3 program yaitu:
 - a. Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu, Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan, Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng, Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin, Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Klaten, Balkesmas Pati, BKIM dan Balabkes PAK, Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan, Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi, presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS, Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer

Sesuai dengan Ketentuan, Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Klaten dan Balkesmas Pati.

- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi, persentase pelatihan kesehatan sesuai standar
 - c. Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan minuman pada kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan, Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
- 8) Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi. Indikator sasaran ini didukung oleh 2 program yaitu:
- a. Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pada kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, dengan indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11%, Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan, Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas

Klaten dan Balkesmas Pati, Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran, Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Klaten, Balkesmas Pati, BKIM dan Balabkes PAK

Semua indikator dalam program dan kegiatan menunjang tercapainya kinerja indikator sasaran Dinas Kesehatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8
Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
Tujuan						
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	99,96				
sasaran :						
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	113,49	Program: Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	100	menunjang
				Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	100	menunjang
				% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	100	menunjang
				Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%	103.20	menunjang
				% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5%	100	menunjang
	Angka Kematian Bayi	84,05	Program: Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	100	menunjang
				Persentase Uci Desa	91.34	menunjang
				% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	100	menunjang
	Angka Kematian Balita	85,66	Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	100	menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	% Pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90%	100	menunjang	
				% Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk kurang dari 0,05%	100	menunjang	
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	105,05	Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	105.26	menunjang
					Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	100	menunjang
					Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambrawa	100	menunjang
					Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	100	menunjang
					Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	100	menunjang
					Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	100	menunjang
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	124,37	Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza	103.90	menunjang
					Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	100	menunjang
					Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker	100	menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Balkesmas Ambarawa		
				Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Magelang	100	menunjang
				Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	100	menunjang
				Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati	100	menunjang
				Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	100	menunjang
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100	Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam	100	menunjang
Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Semarang				100	menunjang	
Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Ambarawa				100	menunjang	
Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Magelang				100	menunjang	
Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Klaten				100	menunjang	
Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Pati				100	menunjang	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan				100,68	1. Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan	Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
	primer dan rujukan sesuai ketentuan		layanan Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin	100	menunjang
				Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang	100	menunjang
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa	100	menunjang
				Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang	100	menunjang
			3. Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makmin Kegiatan: Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten	100	menunjang
				Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Pati	100	menunjang
				Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK	100	menunjang
				Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM	100	menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan	100	menunjang
				presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS	100	menunjang
				Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	100	menunjang
				Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	100	menunjang
				Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang	103.45	menunjang
				Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati.	105.72	menunjang
				Angka kepuasan pelanggan di BKIM	103,20	menunjang
				Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Semarang.	104.91	menunjang
				Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Ambarawa	100.88	menunjang
				Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Klaten	100.29	menunjang
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku	108.57	menunjang
				Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	100	menunjang
				Persentase pelatihan yang sesuai standart	105.26	menunjang
				Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin	100	menunjang
				Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai	100	menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Ketentuan Yang Berlaku		
				Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100	menunjang
				Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	menunjang
				Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik	100	menunjang
				Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11%	110.71	menunjang
				Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	100	menunjang
				Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas ambarawa	100	menunjang
				Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	100	menunjang
				Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	100	menunjang
				Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitas dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	100	menunjang
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	152,38	1. Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan: Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun	100	menunjang
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang	100	menunjang
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Ambarawa	100	menunjang
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Magelang	100	
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten	100	menunjang
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Pati	100	menunjang
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM	100	menunjang
				Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK	100	menunjang
Tujuan :						
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	104,97	Penunjang urusan pemerintah daerah			
sasaran :						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	100,31	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	menunjang
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	menunjang
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100	menunjang
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100	menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	100	menunjang
sasaran :						
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	104,97	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	menunjang

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

4.1 REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023, didukung dengan anggaran APBD(P) Provinsi Rp.720.315.526.000,00 (Tujuh ratus dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 697.210.911.913,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) capaian realisasi keuangan 96,79% dan realisasi fisik 100%. Ada efisiensi sebesar Rp.23.104.614,087 (Dua puluh tiga milyar seratus empat juta enam ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) 3,21%. Alokasi APBN sebesar Rp.17.487.155.000,- (Tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima rupiah) realisasi Rp.14.940.747.069,- (85,44%) dan realisasi fisik 100%.

Ada peningkatan anggaran APBD Provinsi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alokasi anggaran tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 dari Rp.677.130.714.000,00 menjadi Rp.720.315.526.000,00 peningkatan anggaran sebesar Rp.43.184.812.000,- (6%). Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.720.315.526.000,00 digunakan untuk urusan wajib sebesar Rp.564.810.090.000,00 dan non urusan sebesar Rp.155.504.616.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 697.210.911.913,00 (96,79%) lebih rendah dibanding realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.662.666.363.780,- (97,86%) sedangkan realisasi fisik 100% sama dengan tahun 2022

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan di
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	5	6
	DINAS KESEHATAN	720,315,526,000	697,210,911,913	96,79
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	155,504,616,000	145,353,709,036	95,71
	Dinas Kesehatan	107,803,090,000	103,178,910,068	95,71
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	593,455,000	574,866,400	96,87
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	369,455,000	366,269,500	99,14
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	224,000,000	208,596,900	93,12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91,151,596,000	88,020,430,923	96,56
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	89,601,596,000	86,543,334,155	96,59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1,000,000,000	968,356,000	96,84
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	250,000,000	243,940,200	97,58
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD **	300,000,000	264,800,568	88,27
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	845,260,000	818,182,214	96,80
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	250,000,000	248,204,578	99,28
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD **	595,260,000	569,977,636	95,75
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625,000,000	532,962,800	85,27
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	325,000,000	316,622,800	97,42
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	300,000,000	216,340,000	72,11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,508,390,000	3,215,623,885	91,66
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	173,100,000	172,788,475	99,82
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	484,080,000	470,635,200	97,22
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	21,550,000	21,140,500	98,10
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	207,550,000	203,855,300	98,22
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	304,600,000	302,748,550	99,39
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	2,000,000	1,972,000	98,60
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	110,900,000	77,186,700	69,60
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	1,814,970,000	1,605,015,273	88,43
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	389,640,000	360,281,887	92,47
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	487,300,000	485,633,931	99,66

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Pengadaan Mebel **	151,000,000	150,022,148	99,35
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	15,300,000	15,211,783	99,42
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	321,000,000	320,400,000	99,81
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,252,889,000	7,235,786,492	87,68
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	16,100,000	10,202,700	63,37
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	2,399,400,000	1,937,330,692	80,74
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	145,000,000	130,190,000	89,79
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	5,692,389,000	5,158,063,100	90,61
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,339,200,000	2,295,423,423	98,13
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	746,000,000	738,341,394	98,97
2	Pemeliharaan Mebel **	50,000,000	49,950,000	99,90
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	184,700,000	179,088,400	96,96
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **	70,000,000	41,499,960	59,29
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	1,050,000,000	1,049,992,208	100,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	238,500,000	236,551,461	99,18
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	6,211,103,000	5,510,616,068	88,72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,047,503,000	1,546,363,803	75,52
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,047,503,000	1,546,363,803	75,52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	821,168,000	797,588,180	97,13
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	60,000,000	59,999,780	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	60,858,000	59,930,150	98,48
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	125,000,000	124,987,800	99,99
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	150,000,000	149,999,300	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	150,000,000	149,987,100	99,99
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	13,310,000	13,000,000	97,67
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	20,000,000	19,998,700	99,99
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	215,000,000	198,185,350	92,18
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	27,000,000	21,500,000	79,63

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	728,690,000	687,519,800	94,35
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	210,000,000	187,808,800	89,43
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	518,690,000	499,711,000	96,34
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,452,200,000	1,405,857,794	96,81
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	6,000,000	5,975,000	99,58
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	499,400,000	467,955,370	93,70
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	946,800,000	931,927,424	98,43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,161,542,000	1,073,286,491	92,40
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	90,000,000	89,198,250	99,11
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	235,000,000	227,320,520	96,73
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	143,000,000	142,940,300	99,96
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	453,542,000	397,779,423	87,71
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	240,000,000	216,047,998	90,02
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	4,881,307,000	4,723,991,564	96,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,637,307,000	1,565,570,940	95,62
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1,637,307,000	1,565,570,940	95,62
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	635,550,000	631,876,887	99,42
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	30,000,000	29,871,100	99,57
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	90,000,000	89,153,495	99,06
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	16,700,000	16,646,785	99,68
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	120,000,000	119,976,524	99,98
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	105,000,000	104,850,500	99,86
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	13,010,000	13,010,000	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	238,840,000	236,369,483	98,97
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	22,000,000	21,999,000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	536,000,000	526,627,300	98,25
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	160,000,000	155,935,000	97,46
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud **	200,000,000	197,524,000	98,76

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	176,000,000	173,168,300	98,39
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,313,500,000	1,245,627,898	94,83
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	3,000,000	2,855,000	95,17
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	310,000,000	282,377,221	91,09
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	35,000,000	35,000,000	100
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	965,500,000	925,395,677	95,85
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758,950,000	754,288,539	99,39
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	165,000,000	164,295,539	99,57
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	64,800,000	64,521,750	99,57
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	5,000,000	5,000,000	100
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	434,150,000	431,722,000	99,44
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	90,000,000	88,749,250	98,61
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	4,481,151,000	3,649,312,498	81,44
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,478,261,000	1,024,279,573	69,29
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1,478,261,000	1,024,279,573	69,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868,890,000	730,920,852	84,12
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	35,000,000	33,997,200	97,13
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	150,200,000	107,050,250	71,27
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	2,000,000	1,890,000	94,50
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	166,000,000	115,448,120	69,55
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	152,890,000	137,750,200	90,10
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	5,000,000	4,981,900	99,64
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	74,200,000	73,558,000	99,13
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	263,600,000	236,345,182	89,66
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	20,000,000	19,900,000	99,50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	912,376,000	819,149,200	89,78
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	727,376,000	635,962,200	87,43
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud **	60,000,000	59,932,000	99,89

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	125,000,000	123,255,000	98,60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811,624,000	700,539,215	86,31
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	17,000,000	2,467,500	14,51
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	245,000,000	190,124,927	77,60
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	549,624,000	507,946,788	92,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,000,000	374,423,658	91,32
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	160,000,000	125,208,048	78,26
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	52,500,000	52,189,010	99,41
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	30,000,000	29,955,500	99,85
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	120,000,000	119,688,900	99,74
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	47,500,000	47,382,200	99,75
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	5,022,507,000	3,563,271,201	70,95
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,594,533,000	484,104,530	30,36
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1,594,533,000	484,104,530	30,36
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	746,174,000	737,167,064	98,79
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	20,000,000	19,932,800	99,66
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	140,000,000	133,497,950	95,36
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	5,000,000	4,890,000	97,80
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	131,000,000	130,895,745	99,92
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	109,000,000	108,993,975	99,99
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	6,000,000	5,850,000	97,50
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	22,400,000	22,270,000	99,42
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	282,774,000	280,896,594	99,34
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	30,000,000	29,940,000	99,80
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565,000,000	489,491,000	86,64
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	555,000,000	479,776,000	86,45
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	10,000,000	9,715,000	97,15
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,260,800,000	999,928,747	79,31

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	8,000,000	6,195,920	77,45
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	256,000,000	187,465,642	73,23
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	996,800,000	806,267,185	80,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856,000,000	852,579,860	99,60
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	160,000,000	157,865,905	98,67
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	55,000,000	54,483,600	99,06
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	65,000,000	65,000,000	100
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	385,000,000	384,770,855	99,94
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	191,000,000	190,459,500	99,72
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	4,735,530,000	4,392,176,361	92,75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	939,255,000	796,955,841	84,85
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	939,255,000	796,955,841	84,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,051,875,000	959,920,125	91,26
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	40,000,000	39,864,275	99,66
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	387,885,000	382,113,000	98,51
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	65,000,000	64,599,750	99,38
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	80,000,000	72,037,900	90,05
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	125,000,000	124,630,000	99,70
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	4,000,000	3,600,000	90
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	12,720,000	12,688,000	99,75
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	328,600,000	251,987,200	76,69
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	8,670,000	8,400,000	96,89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	556,400,000	554,100,519	99,59
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	49,400,000	49,400,000	100
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud **	50,000,000	50,000,000	100
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	457,000,000	454,700,519	99,50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975,000,000	912,701,969	93,61
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	7,000,000	5,710,000	81,57

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	271,000,000	242,197,397	89,37
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	697,000,000	664,794,572	95,38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,213,000,000	1,168,497,907	96,33
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	168,000,000	149,486,782	88,98
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	160,000,000	145,950,488	91,22
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	660,000,000	649,734,510	98,44
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	225,000,000	223,326,127	99,26
	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	8,084,084,000	7,163,198,922	88,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,083,469,000	3,351,320,606	82,07
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	4,083,469,000	3,351,320,606	82,07
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	884,647,000	873,389,998	98,73
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	62,900,000	62,775,500	99,80
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	297,845,000	296,964,500	99,70
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	12,700,000	12,700,000	100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	110,862,000	102,627,850	92,57
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	100,000,000	99,998,300	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	31,800,000	31,800,000	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	255,640,000	253,623,848	99,21
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	12,900,000	12,900,000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499,160,000	489,427,000	98,05
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	299,160,000	293,300,000	98,04
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	200,000,000	196,127,000	98,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,984,315,000	1,845,109,996	92,98
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	5,000,000	4,554,000	91,08
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	490,000,000	431,832,220	88,13
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	52,300,000	50,829,440	97,19
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	1,437,015,000	1,357,894,336	94,49

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632,493,000	603,951,322	95,49
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	151,025,000	124,716,745	82,58
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	5,000,000	3,805,000	76,10
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	200,000,000	199,800,000	99,90
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	175,300,000	175,294,178	100,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	101,168,000	100,335,399	99,18
	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	7,925,731,000	6,965,312,747	87,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,788,952,000	2,049,989,877	73,50
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,788,952,000	2,049,989,877	73,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,552,981,000	1,504,674,976	96,89
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	30,000,000	29,998,000	99,99
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	780,435,000	751,002,500	96,23
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	98,000,000	97,996,335	100,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	32,400,000	32,386,900	99,96
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	97,000,000	96,968,500	99,97
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	7,000,000	6,979,319	99,70
7	Fasilitas Kunjungan Tamu **	26,500,000	26,213,000	98,92
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	373,646,000	363,321,422	97,24
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	108,000,000	99,809,000	92,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,433,798,000	2,270,323,393	93,28
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	115,750,000	111,461,500	96,30
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	1,025,148,000	888,429,191	86,66
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	97,000,000	87,282,490	89,98
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	1,195,900,000	1,183,150,212	98,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,150,000,000	1,140,324,501	99,16
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	190,000,000	189,931,000	99,96

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	320,000,000	319,855,595	99,95
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	400,000,000	393,049,106	98,26
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	240,000,000	237,488,800	98,95
	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	6,360,113,000	6,206,919,607	97,59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	944,113,000	925,032,465	97,98
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	100,000,000	100,000,000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	180,000,000	177,224,000	98,46
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	300,000,000	284,846,600	94,95
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	7,000,000	7,000,000	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	40,000,000	39,997,800	99,99
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	8,000,000	7,880,000	98,50
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	80,000,000	79,964,000	99,96
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	229,113,000	228,120,065	99,57
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,685,000,000	1,568,208,450	93,07
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	1,234,000,000	1,120,445,500	90,80
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud **	100,000,000	99,345,000	99,35
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	351,000,000	348,417,950	99,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,258,000,000	2,245,890,020	99,46
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	10,000,000	9,990,000	99,90
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	875,000,000	872,295,020	99,69
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	6,800,000	6,800,000	100
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	1,366,200,000	1,356,805,000	99,31
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,473,000,000	1,467,788,672	99,65
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	100,000,000	99,637,077	99,64
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	213,000,000	211,847,395	99,46
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	100,000,000	99,733,500	99,73
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	830,000,000	827,856,300	99,74
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	230,000,000	228,714,400	99,44

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	410,133,510,000	407,051,568,061	93,17
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi di Dinkes	410,133,510,000	407,051,568,061	93,17
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak **	1,703,115,000	1,547,216,455	90,85
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif **	118,353,000	100,406,020	84,84
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut **	170,244,000	155,198,000	91,16
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat **	451,140,000	423,484,263	93,87
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga **	445,000,000	428,069,192	96,20
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan **	742,200,000	727,773,275	98,06
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **	200,000,000	175,333,600	87,67
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) **	1,235,690,000	1,209,397,824	97,87
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **	10,700,306,000	10,308,259,824	96,34
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **	305,000,000	233,001,506	76,39
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **	175,000,000	168,096,500	96,06
12	Pengelolaan Surveilans Kesehatan **	690,310,000	638,694,071	92,52
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota **	240,000,000	221,933,220	92,47
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Bidang Yankes**	200,000,000	190,248,100	95,12
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **	110,000,000	98,183,111	89,26
16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat **	382,564,786,000	380,726,651,454	99,52
17	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas **	585,000,000	564,215,074	96,45
18	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **	150,000,000	148,123,345	98,75
19	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	2,337,615,000	2,294,380,580	98,15
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang			

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **	176,000,000	164,307,700	93,36
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **	862,000,000	830,193,816	96,31
3	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	546,796,000	543,109,500	99,33
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **	212,000,000	172,932,000	81,57
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **	625,000,000	587,856,477	94,06
3	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	691,310,000	649,919,947	94,01
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **	262,000,000	231,760,000	88,46
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **	508,000,000	485,505,034	95,57
3	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	301,040,000	299,810,000	99,59
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **	47,660,000	47,158,000	98,95
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **	197,000,000	193,892,000	98,42
3	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	606,269,000	604,053,000	99,63
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **	222,000,000	219,992,500	99,10
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **	419,645,000	412,280,000	98,24
3	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	306,080,000	302,422,000	98,80
	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus **	10,000,000	9,800,000	98
2	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	107,000,000	100,739,500	94,15
	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A			

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan **	909,951,000	837,171,173	92,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi di Dinkes	139,710,124,000	130,770,529,969	93.60
1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya **	21,010,000	19,048,000	90,66
1	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	40,369,474,000	36,097,576,188	89,42
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang			
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	373,800,000	346,768,725	92,77
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	380,000,000	378,621,751	99,64
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	250,000,000	198,533,581	79,41
4	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	850,000,000	848,896,217	99,87
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa			
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	2,834,000,000	2,801,919,173	98,87
2	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan **	416,000,000	414,249,305	99,58
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	775,000,000	774,580,593	99,95
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	165,000,000	135,470,391	82,10
5	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	1,550,000,000	1,549,725,739	99,98
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang			
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	247,500,000	223,199,570	90,18
2	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan **	400,000,000	341,481,000	85,37
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	390,000,000	386,866,048	99,20
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	90,000,000	58,450,420	64,94

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
5	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	511,500,000	506,681,676	99,06
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten			
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	2,564,500,000	2,564,228,000	99,99
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	530,000,000	528,960,752	99,80
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	385,000,000	373,222,130	96,94
4	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	551,152,000	550,357,557	99,86
	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati			
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	2,140,000,000	2,105,780,104	98,40
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	397,000,000	396,847,192	99,96
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	317,000,000	315,916,268	99,66
4	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	881,920,000	881,183,588	99,92
	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A			
1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya **	35,000,000,000	31,433,791,010	89,81
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	32,158,672,000	31,708,616,151	98,60
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	1,350,000,000	1,349,135,598	99,94
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	423,293,000	418,057,685	98,76
5	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **	1,000,000,000	999,979,575	100,00
	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A			
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya **	2,404,502,000	2,402,761,404	99,93
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) **	3,138,000,000	3,063,820,518	97,64

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan **	6,845,801,000	6,595,804,060	96,35
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	863,000,000	826,211,972	95,74
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan **	863,000,000	826,211,972	95,74
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8,917,752,000	8,705,658,931	97.62
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4,087,967,000	3,958,922,760	96.84
1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	2,798,475,000	2,726,199,900	97,42
2	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang **	185,400,000	178,168,500	96,10
3	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa**	200,000,000	186,635,500	93,32
4	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang**	250,000,000	248,470,000	99,39
5	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten**	150,000,000	146,230,860	97,49
6	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati**	200,000,000	192,757,000	96,38
7	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi di Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A**	304,092,000	280,461,000	92,23
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	4,829,785,000	4,746,736,171	96,28

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang**	1,058,000,000	1,058,000,000	100.00
2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa**	836,000,000	784,823,000	93.88
3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang**	886,000,000	868,897,500	98.07
4	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten**	836,000,000	833,637,982	99.72
5	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati**	886,000,000	883,418,200	99.71
6	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A**	210,000,000	209,998,000	100.00
7	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A**	117,785,000	107,961,489	91.66
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4,583,280,000	4,084,187,722	97,01
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4,583,280,000	4,084,187,722	97,01
1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **	1,068,198,000	1,036,297,357	97,01
1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A**	3,515,082,000	3,047,890,365	86,71
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	603,244,000	458,360,800	75,98
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	548,140,000	405,243,800	73,93
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK **	548,140,000	405,243,800	73,93
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	55,104,000	53,117,000	96,39
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional **	55,104,000	53,117,000	96,39

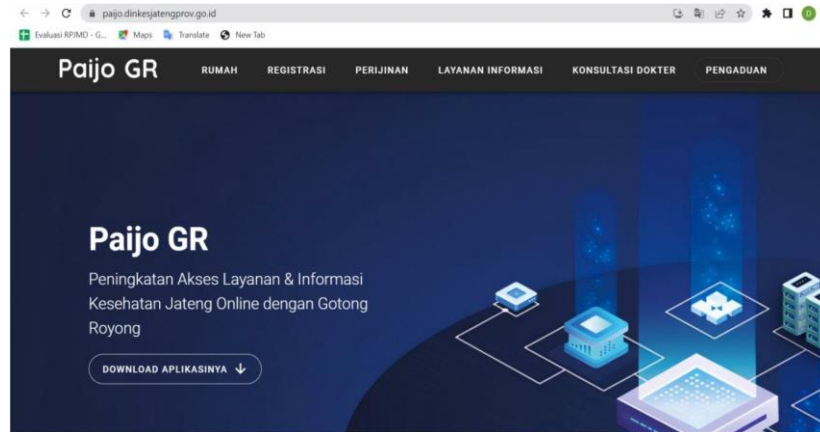
Pendapatan Dinas Kesehatan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.28.998.231.000,00 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 Rp.21.600.000.000,- dan berhasil memberikan pendapatan sebesar Rp.31.138.523.380,00 (107,38%) ada kelebihan pendapatan sebesar Rp.2.137.922.380,00.

4.2 INOVASI

Inovasi yang dikembangkan adalah membuat aplikasi berbasis android PAIJO GR dengan akronim Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong. Aplikasi layanan kesehatan yang diintegrasikan meliputi pendaftaran on line di Balkesmas, PSC 119 untuk melaporkan kejadian di lingkungan sekitar, data cek laboratorium, konsultasi *online*, perijinan berusaha, informasi 5-Ng (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng), e-kohort, Sistem Informasi TB, Kontak PMI, Data RS dan Puskesmas se-Jawa Tengah. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan akses layanan gawat darurat sehari-hari seperti kecelakaan, bencana dan ibu melahirkan dengan harapan mampu menekan angka kematian ibu dan mencegah kasus stunting.

Gambar 3.17
Inovasi PAIJO GR





4.3 PENGHARGAAN

Sebagai wujud kinerja urusan kesehatan memperoleh penghargaan nasional berupa:

1. Penghargaan dari Kemenkes dalam Kategori Provinsi Yang Telah Berhasil Mencapai Target Cakupan Imunisasi Tambahan Campak Rubella Dan Imunisasi Kejar (OPV, IPV dan DPT-HB-HIB) Pada Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional, tanggal 16 Maret 2023
2. Penghargaan dari Kemenkes Peringkat II Kinerja Satuan (07) Dekonsentrasi Award 2022 tanggal 4 April 2023
3. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Peringkat II Perencanaan Kebutuhan Obat Terbaik Tahun 2022 tanggal 4 April 2023
4. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Peringkat III Provinsi dengan Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022 tanggal 4 April 2023
5. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Peringkat I Pengelolaan data vaksin terbaik periode Maret 2022 – Februari 2023 tanggal 4 April 2023
6. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Dinas Kesehatan Provinsi dengan Belanja Obat Produk Dalam Negeri Terbesar pada tahun 2022 tanggal 4 April 2023
7. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Peringkat 1 Upakarti Anindya Tinarbuka dalam Anugerah Tinarbuka Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 17 Mei 2023
8. Penghargaan Kemenkes sebagai Pengelolaan jabfungkes terbaik Tingkat nasional th 2023

Gambar 3.18
Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Tahun 2023



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, meng-koordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran tahun 2023, dari 2 indikator tujuan dan 10 indikator sasaran, 1 indikator tujuan dengan hasil baik yaitu AHH dan 1 indikator dengan hasil sangat baik yaitu indeks kepuasan masyarakat. Dari 10 indikator sasaran, 8 indikator dengan hasil sangat baik, 1 indikator dengan hasil baik, dan 1 indikator hasil cukup.
2. Dibandingkan dengan realisasi kinerja selama 5 tahun lalu capaian indikator tujuan dan sasaran cenderung meningkat.
3. Dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD, semua indikator tujuan telah mencapai target akhir RPJMD, 3 indikator sasaran tidak mencapai target yaitu AKI, AKB dan AKABA.
4. Dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional, terdapat 4 indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional yaitu AHH, AKI, AKB dan IKS. Semua indikator telah melebihi target nasional.
5. Hasil dari analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, ada 1 indikator tujuan yang tidak tercapai yaitu AHH dan 3 indikator dengan persentase capaian lebih dari 120% yaitu AKI, Persentase ketercapaian

upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan jiwa dan indeks keluarga sehat wilayah provinsi.

6. Hasil dari analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, semua indikator kinerja secara fisik kegiatan tercapai 100%, secara capaian kinerja hanya 1 yang belum mencapai target dan semua indikator terdapat efisiensi anggaran.
7. Hasil dari analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, bahwa semua indikator Kesehatan yang disusun telah menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran.
8. Realisasi anggaran dan pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 alokasi anggaran APBD(P) Provinsi Rp.677.130.714.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi anggaran APBD(P) sebesar Rp.662.666.363.780,- (97,86%) dan realisasi fisik 100%. Ada efisiensi anggaran APBD sebesar 14.464.350.220,- (2,14%). Pendapatan Dinas Kesehatan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.21.600.000.000,- dan berhasil memberikan pendapatan sebesar Rp.25.944.042.674,00. Realisasi pendapatan melebihi target dengan capaian 120,11%. Ada kelebihan pendapatan sebesar Rp.4.344.042.674,00
9. Selama tahun 2022, Dinas Kesehatan telah mengembangkan inovasi PAIJO GR aplikasi berbasis android dengan akronim Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong. Penghargaan yang diterima tahun 2022 sebanyak 5 penghargaan tingkat nasional.

B. REKOMENDASI

Dari 10 indikator sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, ada 1 indikator tujuan yang capaiannya kurang dari target yaitu Angka AHH dan 2 indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Capaian AHH ditentukan oleh besarnya jumlah

kematian bayi, Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/kongenital, penyakit degenerative, dan lingkungan tempat tinggal dan tingkat kesehatan ibu dan bayi yang rendah karena buruknya tingkat Kesehatan.

Terhadap penurunan AKB dan AKABA rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

1. Penguatan pelayanan kesehatan anak terpadu (MTBS)
2. Penguatan imunisasi Rutin
3. Penguatan skrining BBL
4. Penguatan Pediatric Social Responsibility (PSR) di Kabupaten Kota

Semarang, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700531 199311 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telepon 024-3517459
Faksimile 024-3517463 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinaskesehatan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2023

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700531 199311 2001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN :			
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,72
SASARAN:			
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	AKI	100
		AKB	7,8
		AKABA	9,2
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	85,71%
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	60%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	69%
		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0,21

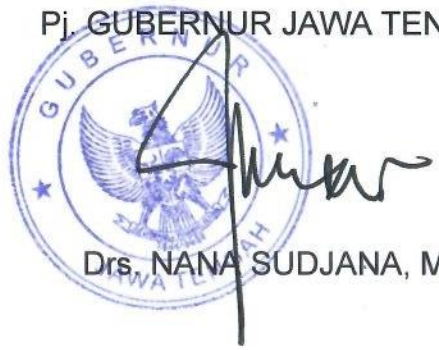
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN :			
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85,5
SASARAN :			
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP	87
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85,5

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 550.706.634.000,00	APBD
2. Peningkatan Kapasita Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 4.583.280.000,00	APBD
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Rp. 603.244.000,00	APBD
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 8.917.752.000,00	APBD
5. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 155.504.616.000,00	APBD
6. Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.084.538.000,00	APBN
7. Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 2.070.316.000,00	APBN
8. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 1.673.558.000,00	APBN

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 5.633.182.000,00	APBN
10. Dukungan Manajemen	Rp. 2.025.601.000,00	APBN

Semarang, November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700531 199311 2001